



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 28 November 2022
Waktu : Pukul 13.30 s.d. 17.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. GOLKAR) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022
2. Penyerahan hasil kompilasi kunjungan kerja pada MS I 2022-2023
3. Progres pembangunan IKN, Food Estate, penanganan infrastruktur pasca banjir dan tanah longsor, serta tindak lanjut Kunker Komisi V DPR RI ke TMII
4. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
41 dari 57 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
8 dari 12 orang Anggota
 1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 2. Mochamad Herviano
 3. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
 4. Sukur H. Nababan, S.T.
 5. Ir. Sudjadi
 6. Harvey B. Malaihollo
 7. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
 8. Djenri Alting Keintjem, S.H., M.H.
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. Cen Sui Lan

4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
6. Ilham Pangestu
7. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)

7 dari 8 orang Anggota

1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
2. Ir. Sumail Abdullah
3. Sudewo, S.T., M.T.
4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
6. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
7. Andre Rosiade

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

3 dari 6 orang Anggota

1. Roberth Rouw
2. Drs. H. Soehartono, M.Si.
3. Sri Wahyuni

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)

4 dari 6 orang Anggota

1. H. Ruslan M. Daud
2. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
3. Sofyan Ali, S.H.
4. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
2. Lasmi Indaryani, S.E.
3. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)

2 dari 5 orang Anggota

1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
2. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

5 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.

5. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Menteri PUPR RI (Dr. Ir. Mochamad Basuki
Hadimoeljono, M.Sc.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-P.GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE):

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Pak Menteri PUPR beserta seluruh jajarannya dan hadirin
yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat baik secara fisik maupun secara virtual. Kami semua menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi di Cianjur dan kami mendoakan semoga Tuhan yang Maha Esa memberi kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 30 orang, terdiri dari 15 orang fisik dan 13 orang hadir virtual dengan jumlah 7 Fraksi, sehingga telah memenuhi kuorum. Sebelum dilanjutkan, perkenankan kami memperkenalkan Anggota Komisi V yang baru dari Fraksi PDIP yaitu Saudari Irine Yusiana Roba Putri ada ada? Iya, silakan berdiri sekaligus perkenalkan namanya kalau boleh, sekaligus...sekaligus silakan menyampaikan.

F-PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos, MCOMN&MEDIASST):

Terima kasih, Pimpinan yang saya hormati.

Pak Menteri, nama saya Irene Yusiana Roba Putri, Pak, saya dari daerah pemilihan Maluku Utara pindahan dari Komisi I, mohon bimbingannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, makasih.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Izinkanlah kami membuka rapat kerja pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Kerja Komisi V DPR RI Pada hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB)

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Interupsi,, Pimpinan sebelum dilanjut.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Saya Sumail Abdullah Kapoksi dari Partai Gerindra ingin menyampaikan bahwa hari ini, Gerindra ada satu tambahan Anggota baru namanya Pak Andre Rosiade.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Oh iya betul mohon maaf ya.

Iya dari saya ulangi kembali kalau *gitu*, ya, ada juga dari Saudara Irma apa, Pak Djenri Alting Keintjem, Nomor Anggota 253 Dapil Sulawesi Utara kami persilakan berdiri, iya dari Fraksi PDIP. Kemudian, yang baru dari Fraksi Partai Gerindra, Saudara Andre Rosiade Nomor Anggota A 65 dari Dapil Sumatera Barat.

Kami persilakan, Pak

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Iya terima kasih, Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan, salam hormat dan salam kenal Pimpinan Komisi V dan seluruh Anggota Komisi V dan Pak Menteri serta jajaran. Saya Andre Rosiade Fraksi Partai Gerindra Dapil Sumatera Barat 1.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Demikianlah Pak Menteri, apa yang apa namanya yang baru masuk pada kesempatan ini. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Pak Menteri PUPR beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami. Pada hari ini, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, progres pembangunan IKN, *food estate*, dan penanganan infrastruktur pasca banjir dan longsor, serta tindak lanjut Kunker Komisi V DPR RI ke Taman Mini Indonesia Indah dan lain-lain.

Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI dan Pak Menteri serta hadirin yang kami hormati.

Agenda pertama yaitu mengenai evaluasi capaian Kementerian PUPR sampai dengan bulan November 2002...2022. Adapun hal yang menjadi catatan kami terkait evaluasi APBN Tahun Anggaran 2022, bahwa capaian keuangan kementerian PUPR per 26 November 2022 adalah sebesar 69,41% dan capaian fisik sebesar 75,04%. Hal ini, masih di bawah target bulan November 2022 yaitu sebesar 77,86%, untuk target capaian keuangan dan 79,46% pencapaian fisik. Untuk itu, pada kesempatan rapat kerja ini kami perlu mendapatkan penjelasan dari Kementerian PUPR tentang upaya-upaya yang diambil agar capaian dapat ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Kedua, terkait dengan Ibu Kota Negara IKN. Pada kesempatan ini kami juga hendak mengetahui progres kegiatan pembangunan Ibu Kota Negara terkait dengan pembangunan IKN. Kami ingin mengetahui secara rinci proyek infrastruktur oleh Kementerian PUPR yang dilakukan saat ini dan bagaimana perencanaan ke depan. Di samping itu, kami juga ingin mendengar apa saja masalah yang mendasar dalam pengembangan IKN ini dan langkah-langkah strategis yang telah ditempuh Kementerian PUPR dalam menyelesaikannya.

Ketiga, mengenai pembangunan infrastruktur *food estate*. Kami hendak mendapatkan penjelasan antara lain tentang kegiatan yang sedang dikerjakan di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, baik target maupun progres yang telah dicapai serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Keempat, terkait dengan banyaknya bencana yang terjadi di beberapa daerah yaitu banjir, tanah longsor dan juga gempa bumi, seperti yang telah terjadi di Kabupaten Cianjur. Komisi V DPR RI hendak mendengarkan penjelasan dari Kementerian PUPR tentang rencana aksi dan pelaksanaan rehabilitasi maupun rekonstruksi di berbagai daerah tersebut pasca terjadinya bencana.

Kelima, kami juga ingin mengetahui bagaimana tindak lanjut Kementerian PUPR terhadap masukan dan rekomendasi oleh Komisi V DPR RI saat kunjungan kerja antara lain: ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dalam rangka persiapan KTT G20 tanggal 28 September 2022 yang lalu.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI terdapat sejumlah isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR, antara lain:

1. Perlu meningkatkan sistem *monitoring* evaluasi rutin dan koordinasi secara reguler untuk mempercepat realisasi anggaran di masing-masing unit kerja.
2. Kedua, Kementerian PUPR perlu segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan pemulihan seluruh bangunan infrastruktur pendukung di daerah yang kena bencana dalam rangka memulihkan konektivitas dan pelayanan dasar kepada masyarakat.
3. Ketiga terkait dengan pembangunan IKN dan infrastruktur untuk *food estate*, Kementerian PUPR agar dalam merealisasikan kegiatan infrastruktur selalu berdasarkan kajian dan analisis yang komprehensif dan memaksimalkan pemanfaatan bahan materi lokal serta mengoptimalkan keikutsertaan penyedia jasa dan tenaga kerja di daerah.
4. Perlu disampaikan, bahwa masalah yang sering ditemui pada saat kunjungan kerja maupun audiensi dengan Pemerintah Daerah adalah kegiatan pembangunan yang tidak dapat berlanjut, karena masalah pembebasan lahan dan juga masalah serah terima aset. Hal ini harus mendapat perhatian karena akan mempengaruhi capaian dan kinerja Kementerian PUPR.

Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI dan Pak Menteri, serta kehadiran yang kami hormati serta hadirin yang kami hormati.

Demikian pengantar dari kami dan selanjutnya kami persilakan kepada Pak Menteri PUPR untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya. Kami persilakan, Pak Menteri.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bapak-Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI yang terhormat dan saya hormati,

Ibu-Bapak Anggota DPR Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Sebelum kami menyampaikan paparan sesuai dengan agenda dalam undangan, izinkan kami memperkenalkan juga untuk para Anggota DPR RI yang baru. Sebelah kanan, paling kanan adalah Pak Jarot (Direktur Jenderal Sumber Daya Air), Kemudian Pak Sekjen, Pak Fatah Zainal Fatah, sebelah kiri saya Pak Irjen, Pak Tengku Iskandar dan paling kiri adalah Pak Hedi Rahadian (Direktur Jenderal Bina Marga), yang di atas adalah (Kepala Badan Sumber Daya Manusia Pengembangan Sumber Daya Manusia) Pak Kalawi, kemudian Pak Hery TZ (Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan). Kemudian, Pak Hendra Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi dan Ekonomi dan Ibu Diana (Direktur Jendral Ciptakarya), kemudian Pak Yuda (Direktur Jendral

Bina Konstruksi), mohon maaf Pak Direktur Jendral Perumahan sedang mendampingi Bapak Wakil Presiden di Papua. Kemudian, ada Kepala BPJT Pak Danang Parikesit, sedangkan di antaranya adalah Pak Birendrajaya bukan, Pak Biren (Direktur Bina Program Sumber Daya Air).

Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati,

Sesuai dengan undangan, kami ingin menyampaikan beberapa paparan tentang yang pertama Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022. Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2022 telah mengalami perubahan-perubahan dari yang semula disampaikan pada Komisi V, 100,59 triliun menjadi 121,40 triliun tetap bertambah sebesar 20,81 triliun, yang berasal dari;

1. Luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 2,3 triliun. Antara lain untuk pembangunan daerah irigasi dan pembangunan seperti jalan dan jembatan.
2. Percepatan pinjaman dan hibah luar negeri sebesar 7,13 triliun, untuk Indonesia *Tourism Development Project* ini untuk yang 5 destinasi wisata. Kemudian *National Affordable Housing Program* (NAHP) yang juga untuk PSPS. *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) dan *Dam Operational Improvement And Safety Project* Rehabilitasi Dam-Dam eksisting yang ada.
3. Penyelesaian rupiah murni sebesar 11,38 triliun untuk dukungan pada *event* nasional KTT 20 G20 ASEAN Summit dan MotoGP serta penanganan dampak bencana di Jawa Timur, Sulawesi Barat, NTT, NTB, Banten dan tambahan untuk Lembaga Manajemen Aset Negara untuk pembebasan lahan di serta pembangunan di IKN.

Sehingga, dari 100,59 triliun tadi menjadi 121,40 triliun, hingga seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi V hingga 26 November 2022 pukul 18.00 WIB, Realisasi Keuangan Kementerian PUPR sebesar 84,3 triliun atau 69,4% dari total Pagu 121,14 triliun dengan realisasi fisik sebesar 75%.

Untuk Program Padat Karya Tunai, realisasi keuangan saat ini sebesar 12,97 triliun atau 85,8% dari total Pagu Anggaran 15,11 triliun dan menyerap tenaga kerja 661.000 orang atau 82,8% dari target 768.000 orang. Prognosisnya, penyerapan Tahun Anggaran 2022 sebesar 96,04%, dengan menyisakan potensi sisa anggaran sebesar 4,81 triliun terutama pada Dirjen Sumber Daya Air sebesar 1,39 triliun dan Dirjen Bina Marga sebesar 2,53 triliun.

Langkah-langkah pengakhiran Tahun Anggaran 2022.

1. Pertama, mengalokasikan anggaran yang berpotensi tidak terserap untuk dialihkan antara lain itu penanganan bencana.
2. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk percepat penyelesaian infrastruktur dengan progres tinggi yang harus selesai pada akhir Tahun 2022 dan Kementerian PUPR akan merujuk pada SE Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa yang Terdampak atas Kenaikan Harga BBM dan atau Aspal pada Tahun Anggaran 2022 dalam

rangka penyesuaian harga dan penyesuaian nilai kontrak yang terdampak kenaikan harga BBM.

Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kenapa tadi progresnya di bawah target 2022. Ini tadi karena dampak dari keadaan ekonomi di Indonesia terutama setelah kenaikan harga BBM, sehingga penyedia jasa terutama untuk jalan, itu menunggu ada eskalasi atau tidak jadi mereka *ngerem*. Nah, setelah ada SE ini setelah kita urus dan ada SE ini, ini mereka sekarang jalan kembali. Ada beberapa yang sudah sempat kita putus kontraknya karena memang berhenti tapi yang lainnya sebagian besar sudah bisa dibantu dengan SE, apa dengan eskalasi dengan adanya surat edaran LKPP.

Dulu eskalasi di dasarkan pada surat keputusan Menteri Keuangan Tahun 2021, pada saat LKPP-nya belum ada pengurusnya sehingga sekarang Kementerian Keuangan menyerahkan kepada LKPP dan kita urus kemudian menjadi surat edaran LKPP ini. Ini sudah bisa dipakai dasar untuk melakukan eskalasi dan sekarang sedang dilakukan prosesnya termasuk revisi Dipanya.

Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati.

Yang kedua adalah untuk progres pembangunan IKN. Rencana pembangunan infrastruktur IKN Tahun 2022-2024, jadi IKN ini memang kita sudah mulai pembangunannya pada Tahun 2022 ini untuk pembangunan prasarana dasarnya yaitu di kawasan inti pembangunan Pusat Pemerintahan di WP1A, yang Bapak-Bapak juga sudah mengunjungi di titik nolnya. Yaitu berupa jalan tol dari jalan Tol Balikpapan - Banjarmasin menuju ke Jembatan Pulau Balang, sekarang sedang progres nanti akan kami sampaikan. Kemudian, menyiapkan air bakunya melalui Intake Sepaku menyelesaikan Bendungan Sepoi Sepaku, kemudian membantu LHK untuk menyiapkan *nursery*-nya dan kemudian jalan-jalan di kawasan *land development* dan juga beberapa perkantoran yang sudah akan kita mulai pada tahun, pada bulan ini.

Jadi, pelaksanaan lelang Tahun 2022 untuk pembangunan infrastruktur di luar kawasan inti Pemerintahan ini yang termasuk Intake. Dan, juga beberapa jalan tol dan jalan nasional, dan pelaksanaan lelang tahun pembangunan di kawasan KIPP di Zona 1A sebanyak 25 kegiatan dan kegiatan yang telah terkontrak sampai dengan minggu ke-4 November sebanyak 22 kegiatan senilai 15,01 triliun. Total yang 2022 - 2024 yang dimulai pada Tahun 2022 adalah 25 triliun dan yang sudah terkontrak sampai dengan minggu ke-4 ini sebesar 15 triliun dari 22 kegiatan. Terdiri dari sumber daya air 4 kegiatan, senilai 1,08 triliun, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang progresnya sudah 78,7% mudah-mudahan Desember ini sudah bisa kita selesaikan. Kemudian Intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku, ini untuk air bakunya 47,2% dan penyediaan air baku persemaian Mentawir untuk mendukung Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) Lingkungan Hidup dan Kehutanan, progresnya 45,9%. Kemudian, Bina Marga ada 12 kegiatan senilai 8,71 triliun, pembangunan jalan lingkaran Sepaku, kemudian dengan progres 45,7% jalan tol IKN progresnya baru ini yang 1%, Jalan Subuh Kebangsaan Sisi Barat sebesar 100%, persevasi Jalan Simpang IPSI sampai Simpang Riko

66,4% dan persevasi Jalan Simpang Riko ke Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek sebesar 58,8% dan pengadaan jembatan panel darurat tahap kedua.

Untuk ke Cipta Karya, ada lima kegiatan senilai 4,66 triliun yaitu untuk menyiapkan *land development*, KIPP tahap 1 dan tahap 2. Land development ini membuat kavling-kavling, cuman kavlingnya tidak dengan pagar tapi kita menggunakan pohon-pohon ini untuk menjadi kavling-kavlingnya, sehingga dengan *land develop* ini tahu mana lokasi perkantoran masing-masing Kementerian dan Kepresidenan serta Wakil Presiden. Kemudian, perumahan kita membangun 22 tower untuk hunian pekerja konstruksi, 7 tower sedang dikerjakan dengan progres 36,8%. Jadi, Ibu-Bapak sekalian, metode kerja nanti di IKN, para pekerja konstruksi tidak boleh membuat bedeng-bedeng sendiri semua di-*pull* di hunian apa di tower-tower hunian untuk seluruh pekerja konstruksi ini. Dan kegiatan terletak pada...pada bulan sekarang ini yang sedang akan dalam proses kontrak yaitu pembangunan embung, di sini akan dibangun 19 embung yang pada saat konstruksi ini berfungsi untuk menampung *ran off* dari misalnya ada bukaan tanah seperti ini adalah *ran off*-nya di tampung di embung-embung di sekitarnya di situ sehingga tidak mempolusi riparian di sekitarnya.

Untuk Bina Marga ada 4 kegiatan senilai 1,59 triliun, pembangunan akses persemalaman IKN Mentawir, dermaga logistik pembangunan IKN, jadi ini akan dibangun dermaga logistiknya di Teluk Balikpapan. Cipta Karya 12 kegiatan senilai 7,08 triliun yaitu pembangunan instalasi penjernih air dan pendukung SPAM Sepaku, tempat pengelolaan sampah terpadu, penataan sumbu kebangsaan tahap 1 dan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator. Ada 4 kantor Kementerian Koordinator yang di bangun.

Kementerian Koordinator ada empat Kementerian Koordinator yang di bangun dengan kegiatan Tahun 2022 sampai 2024 ini. Perumahan tadi akan dibangun pembangunan rumah dinas di KIPP IKN sebesar 510 Miliar. Untuk perkembangan minat investasi di IKN dapat kami laporkan mengalami peningkatan 25 kali lipat dari total lahan yang ditawarkan pada sosialisasi awal pada tahun 22 Agustus, dari semula 38 hektar menjadi 965 hektar. Untuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perkantoran.

Pertama, investasi pada fasilitas pendidikan terdapat 41 hektar pada zona 1 B, terdiri dari perguruan tinggi, sekolah internasional, sekolah dan (*suara kurang jelas*), sekolah terpadu internasional dan lembaga riset swasta.

B. Investasi pada fasilitas kesehatan, seluas 29 hektar terdiri dari rumah sakit nasional terpadu dan rumah sakit lainnya.

C. Investasi pada sektor perumahan seluas 155 hektar pada zona 1A dan 1B untuk kawasan residensial.

D. Investasi pada fasilitas perkantoran jasa dan komersil seluas 14,4 hektar, meliputi area perkantoran BMN, retail, outlet, dan departemen store.

E. Investasi pada areal *mix use* seluas 16 hektar di KIPP pada area campuran kepadatan tinggi dan area campuran kepadatan sedang.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan IKN dan menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan pengembangan wilayah perencanaan pusat pemerintahan Zona 1B dan 1C. Kami telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor KO-0101/2010, perihal usulan kebutuhan anggaran percepat pembangunan Ibukota Negara pada Tahun 2023 sebesar 12,7 triliun, untuk pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan KIT dan *performance* dan pembangunan hunian ASN TNI-Polri.

Ibu-Bapak sekalian, perlu kami detailkan bahwa setelah adanya market *sounding* yang dilakukan oleh Bapak Presiden pada tanggal 22 Agustus dengan banyaknya investor yang ingin masuk, maka kami diperintahkan untuk mempercepat pembangunan IKN ini tidak hanya di KIPP 1A tapi juga di wilayah pengembangan perencanaan di 1B dan 1C. Tadi pagi, kami ucapkan terima kasih pada Komisi V karena menunda sedikit ini menjadi jam 13.30, tadi pagi jam 10.30 ada Rapat Ratas tentang hal ini sehingga kami termasuk pembiayaan oleh Otorita dengan investasinya. *Nah*, untuk yang prasarana dasar ini, jadi dari 1B dan 1C akan kita fokuskan dulu pada *land development* dan pembangunan jalan aksesnya saja dulu. Sedangkan, perumahan sebetulnya ini 12,7 triliun ini termasuk perumahan ASN TNI-Polri sebesar 9,4 triliun, sisanya itu *land development* dan jalan. Kami untuk itu fokuskan dulu di *land development* dan jalan. *Nah*, ini akan kita mulai Januari karena triwulan kedua, Bapak Presiden ingin mengajak para investor untuk memerintahkan atau menawarkan mana-mana di daerah mana saja yang akan dibangun rumah sakit dan lainnya tadi yang kami sebutkan tadi.

Kemudian, yang selanjutnya adalah progres pembangunan *food estate*. Kementerian PUPR membangun infrastruktur *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua dengan rincian sebagai berikut: Di *food estate* Kalimantan Tengah dengan komoditas rencana adalah padi dan tanaman pangan. Luas potensial di lokasi *x village* seluas 43.500 hektar dengan fokus penanganan di Blok A sebesar 29,28...29.250 hektar dengan kegiatan rehabilitasi dalam peningkatan sistem tata air mikro. Ini...ini salah satu gambarnya yang kita rehabilitasi jaringan irigasi sekundernya. Tahun 2020-2021 telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di rawa, Blok A sepanjang 2195 KM, baik yang primer, sekunder, maupun tersier dan pembangunan 166 pintu air dan jembatan Blok A, serta 18 sumur air tanah.

Tahun 2022 dilaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi pintu air daerah irigasi Rawa Dadahup tahap kedua, saat ini progresnya 92,8%. Tahun 2020-2022, peningkatan jalan sepanjang 77,30 KM dan jembatan sepanjang 230 meter dengan *progres* telah selesai, ini adalah jalan-jalan di kawasan *food estate*. Mungkin ada lanjut fotonya di *food estate* Kalimantan Tengah ini.

Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kami di *food estate* Kalimantan Tengah di Dadahup, Kementerian PU membuat demplot untuk memberi contoh bahwa ini

memang dapat ditanami. Lanjut, ini adalah temen-temen di balai yang menanam padinya, kemudian ini juga demplot kami luasnya total 46 hektar. Lanjut, lanjut, *ah*, kebetulan kemarin Pak Mentan juga membuktikan bahwa di sana mestinya bisa, sudah bisa ditanami hanya karena memang mungkin pertanyaan orangnya *nggak* ada sehingga agak lambat. Makanya kita stop dengan 43.500 hektar, mestinya bisa diperluas lagi tapi karena belum bisa bersamaan menanam di belakangnya, *ah* ini sekarang beliau sudah membuktikan sendiri. Lanjut, ini adalah jalan-jalan yang kita perbaiki untuk di kawasan *food estate*. Lanjut, ini Pak, jadi dilatarbelakangi oleh yang hijau-hijau itu adalah demplot PU. Ini *alhamdulillah* sekarang pertanian sedang mulai menanam, ya, bahwa air sudah bisa kita kendalikan di daerah irigasi Dadahup ini.

Lanjut. Oke, kemudian di *food estate* Sumatera Utara untuk pengembangan hortikultura dengan komoditas bawang merah, bawang putih dan kentang. *Healthy food estate* Kalimantan Tengah tadi, diharapkan komunitasnya padi dan tanaman pangan termasuk singkong. Luas potensial di Sumatera Utara ini 1.000 hektar dengan luas efektif yang akan dikelola 748,6 hektar. Pada Tahun 2021/2022, Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan irigasi tetes *trip irrigation* di lokasi *food estate* seluas 143,5 hektar di blok B Desa Ria-Ria dan yang sudah ditanami seluas 17 hektar untuk budidaya bawang merah. Ini salah satu embungnya untuk sumber air di sana. *Land clearing* di kawasan taman sains dan teknologi herbal seluas 72 hektar, dari rencana 200 hektar dengan pemberian bantuan kepada Pemerintah Daerah berupa satu...tujuh unit ekskavator untuk *land clearing* di lokasi seluas 785 hektar. Tadinya, kami ditugasi 785 hektar, namun Kabupaten Humbang Hasundutan, minta dibantu saja dengan 7...10 excavator, karena di sana sudah ada 3 kami tambah 7 mereka akan membuat *land clearing* sendiri. Dan, pembangunan jalan akses TSTH tadi, Taman Sains dan Teknologi Herbal, sepanjang 14,3 km. Jalan akses *food estate* 8,6 KM dan 2 jembatan, ini adalah jalan-jalan yang tadi. Kemudian, pembangunan fasilitas TSTH, antara lain gedung *riset*, *mess* karyawan dan infrastruktur kawasan dengan progres 61,6% dan target selesai April 2023, ini adalah laboratorium dari TSTH tadi.

Pada Tahun 2023, Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati. Akan dilaksanakan pembangunan jalan utama dalam kawasan *food estate* 1.000 hektar yaitu segmen 3 sepanjang 5,6 km. Kemudian, lanjutan pembangunan jalan akses TSTH sepanjang 1,2 km dan pembangunan jalan dalam kawasan 1.000 hektar, sepanjang 8,84 km. Yang ketiga, *food estate* di Nusa Tenggara Timur untuk pengembangan sorgum dan tanaman pangan dikembangkan, di 1 di Belu dengan komunitas sorgum, jagung, tomat, dan kacang hijau, kita kembangkan dengan potensi air tanah dan Bendungan Rotiklot yang sudah kita bangun serta bendungan atau embung besar Haliwen dan Haikrit. Luas potensial yang ada, 365 hektar dan seluruhnya telah dilayani irigasi Blinker dengan dan sudah ditanami 43,9 hektar untuk sorgum dan jagung. Pada Tahun 2021 telah dibangun jaringan irigasi *sprinkler* di 135 hektar dari Bendungan Rotiklot Haliwen dan Haikrit dan 23 unit sumur jaringan irigasi air tanah. Kemudian, di Kabupaten Sumba Tengah luas potensial 6.100 hektar dengan prioritas penanganan pada DI Waibakul, seluas 241 hektar dan di Wakabeli 261 hektar dan DI Wekapidi 483 hektar dan DI Lokojange 770 hektar yang

bersumber dari 7 Embung dengan luas layanan 960 hektar dan 30 sumur bor dengan luas layanan 180 hektar. Pada Tahun 2021-2022 telah dilaksanakan peningkatan jaringan irigasi kiri embung Lokojange dan telah selesai.

Kemudian, ini adalah sumur-sumur air tanah yang dipakai di Sumba Tengah dalam rangka HUT STT di Sumba Tengah ini. Kemudian, di Kabupaten Sumba Timur luas potensialnya 900 hektar di Kecamatan Pandawai itu, 400 hektar dan Kecamatan Umalulu 500 hektar. Untuk sorgum mulai Oktober 2022, mulai ditanam 10 hektar di Laipori Kecamatan Pandewai bekerjasama dengan P3H dan kelompok tani. Sumber airnya berasal dari 50 titik sumur tanah dangkal dan 8 titik sumur bor di Kecamatan Pandiwai dan Kecamatan Umalulu. Jadi, Sumba Timur ini ternyata banyak sekali airnya kami sudah ke sana makanya dengan cukup dengan sumur air tanah dangkal sumur gali yang kami sudah bikin 50 titik sumur, sudah bisa dengan semua apa pompa sentrifugal. Seperti halnya, di Kupang di dataran Oisau itu sekarang menjadi pusat sayur di Kupang, karena sumur-sumur dangkal ini. Dulu, pada saat di sana saya 84, kita mau makan bayam *nunggu* kapal mendarat dari Surabaya. Kerupuk, terong itu juga dia menunggu dari Surabaya, sekarang sudah bisa di bikin di Kupang.

Kemudian yang keempat, *food estate* di Kabupaten Keerom Papua dengan komoditas jagung. Luas potensial 10.000 hektar, di mana 7.000 hektar merupakan area APL (Area Penggunaan Lahan) yang masih berupa hutan dan 3.000 hektar merupakan area x plasma sawit di 7 kampung yang akan ditangani irigasinya. Pada tahun ini, dilaksanakan kegiatan *land clearing* seluas 496 hektar, progresnya 67,2% dan pembangunan jaringan saluran drainase untuk 2022/23 seluas 3.000 hektar, sehingga kita utamakan yang 3.000 hektar lebih dulu. Kemudian, ini akan segera kami semua sudah, selain di *land clearing* sudah langsung diolah tanah dan disiapkan bibitnya untuk segera kita mulai tanam.

Bapak-Ibu, Bapak Ketua dan Ibu-Bapak Anggota DPR RI Komisi V yang terhormat dan kami hormati,

Yang selanjutnya yang keempat adalah laporan tentang penanganan infrastruktur pasca banjir dan tanah longsor, ini sekarang yang sedang kami fokuskan.

Bapak sekalian yang kami hormati,

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR, menyelenggarakan penanggulangan bencana berdasarkan siklus kebencanaan. Saya kira ini SOP ini sudah kita semua sudah paham yaitu pra-bencana yang meliputi pencegahan dan mulai dari perencanaan pembangunan, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Yang kedua, tanggap darurat saat terjadi bencana dan pasca bencana berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada saat tahap pra-bencana kami mengedepankan upaya pencegahan antara lain dengan pembangunan infrastruktur tangguh bencana dan bersinergi dengan *stakeholder* seperti BMKG dan BNPB. Seperti contohnya, Ibu-Bapak sekalian, sekarang ada beberapa bendungan-bendungan yang desainnya kita sesuaikan. Yang tadinya tidak mempunyai

pintu sekarang sedang kita upayakan untuk segera dibangun pintu-pintunya, sehingga pada saat sebelum hujan itu *flat storag*. jadi ruang air untuk menampung air banjir itu kita kosongkan. Kalau sebelumnya tidak bisa dioperasikan karena tidak ada pintunya hanya melalui oftikernya *aja* sekarang sudah kita pasang pintu-pintunya untuk bisa dioperasikan.

Kemudian, untuk mitigasi antara lain dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan sebagainya dan kesiapsiagaan antara lain kesiapsiagaan bahan material, termasuk kami membuat aturan Kepala Balai, Kepala Balai Besar, tidak boleh meninggalkan wilayah terutama daerah-daerah yang menurut BMKG mempunyai kerentanan yang tinggi, dilarang meninggalkan wilayah kerjanya selain dengan izin Menteri, bukan hanya Dirjen tapi izin Menteri. Yang ketiga, pada tahap tanggap darurat, Kementerian PUPR melaksanakan mobilisasi alat berat personal dalam rangka pemulihan akses untuk kelancaran penyaluran bantuan obat-obatan, pembersihan puing-puing, pengiriman sarana identifikasi kerusakan dan penanganan sementara infrastruktur terdampak. Ini yang sekarang sedang kita lakukan di...di terutama di Cianjur. Jadi, pertama, pada saat siang terjadi bencana malam kami sudah dengan Bu Neneng Bu Eneng, Bu Neneng sudah di Cugenang untuk membuka akses jalan nasional puncak apa, Cianjur dan *alhamdulillah* pada jam subuh sudah terbuka, sehingga sudah bisa dilalui. Jadi, ini sekarang sedang dilakukan, kemudian pengiriman semua *mobile, mobile* apa, *portable toilet treatment water treatment plan*, ada dua yang bisa kita kirim. Kemudian, mobil-mobil tangki dan juga 200 hidran umum yang sudah kita apa distribusikan di Cianjur ini. Yang sebelah kanan itu namanya hidran umum dan mobil tangkinya ini kami kirim hari malam jam 12, sudah kita kirim ke sana itu. Ini adalah *temporary* atau apa namanya *portable toilet*, ini ada 200 lebih sudah kita kirim ke Cianjur. Lanjut, tenda-tenda PU juga kami hanya ada beberapa tenda besar, namun kami ikut membantu untuk para korban longsor ini.

Lanjut, ini adalah *water treatment plant*, jadi air sungai bisa langsung di teritip untuk bisa dipakai untuk minum. Lanjut, hanya ada dua, kami ya ini biasa ini malam itu kami cek langsung kita kirim malam itu juga ke Cianjur, ini hari Kamis yang lalu Kamis malam *eh* Rabu di pakai PU ini masih Rabu ini.

Lanjut, ini yang kunjungan beliau yang terakhir. Lanjut, ini longsor-anlongoran yang terus kami membuka longsor-an tidak hanya di jalan nasional, kemarin Pak Dirjen Bina Marga juga sudah langsung cek ke sana lagi 2 hari di sana ada membuka kawasan-kawasan yang menurut beliau sekarang sudah *nggak* ada yang ada terisolir jembatan yang putus pun ada alternatifnya, nanti kalau ada detail pertanyaan isolasi ini, Pak Dirjen Bina Marga sudah ada di sana. Lanjut, *oh*, ini mundur malahan, ini yang terus kami lakukan untuk membuka konektivitas.

Kemudian, pada termasuk sekarang Pak Dirjen Perumahan yang lalu sudah langsung mengidentifikasi, jadi data terakhir ada 27.000 rumah rusak 11.000 rusak berat, 11.000 rusak sedang dan 22.000 rusak ringan. Kami ditugasi untuk yang rusak berat, kalau yang harus direlokasi sekarang baru ada 2 hektar yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur kami sudah langsung *land clearing*, (*suara kurang jelas*) *alhamdulillah* kami punya stock (*suara kurang*

jelas) jadi akan kita segera bangun. Sedangkan, yang rusak berat yang *insitu* ini yang sedang kita pikirkan, karena dia *brek* gitu, biasanya *tuh* rumah-rumah yang istilah kami *non engineer houses* jadi rumah yang *nggak* pakai kolom. Kita tidak akan menyalahkan masyarakat memang mereka mampunya begitu, maka istilahnya kita *non engineer*, yang dibangun sesuai *engineering* tetap utuh, tapi disebelahnya *brek*. Nah, ini yang akan kita perbaiki, kalau yang merelokasi kami akan bangun. Kalau yang mau bangun sendiri, BNPB, itu tugasnya memberikan 50 juta tadi, Pak. Kami akan memberikan supervisi teknisnya, kalau bisa dengan RISHA akan kita beli dengan RISHA. Itu adalah pascanya sekarang kita sudah memverifikasi semua data termasuk terutama yang rumah-rumah.

Kemudian yang kelima, Kementerian PUPR melakukan penanganan pasca bencana, ini selain di tadi yang di Cianjur. Pertama, yang bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara dan Bener Meriah di Aceh, pada tanggal 4 Oktober, di lakukan penanganan kegiatan tanggap darurat berupa perbaikan tanggul jebol dengan menggunakan bronjong dan *geoboks*. Layanan air bersih dan mempercepat konstruksi Bendungan Kerto. Selain itu juga, di salurkan layanan air bersih dan sanitasi termasuk fasilitas MCK dan darurat ke lokasi pengungsian.

Kemudian, bencana longsor di Sitinjau Lauik-Sumatera Barat, ini saya kira karena ini beliau ada di sini ini, Pak Andri, ini oke, tentang Sitinjau Lauik. Satu Oktober dilakukan penanganan kegiatan darurat dengan pemasangan rambu, pembersihan longsor dan pemasangan bronjong. Kami sedang mengupayakan Sitinjau Lauik ini, geometriknya tidak layak untuk bisa dijadikan jalan nasional. Kami sedang upayakan untuk dibikinkan, dibangun seperti apa kelok 9, kami sudah tahu daerah-daerah trasenya, sedangkan Pak Dirjen sudah mendetailkan desainnya nanti akan *insya Allah* akan segera kita lakukan pelelangan dan pekerjaannya.

Kemudian, yang bencana di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara dan pada tanggal 1 Oktober dilakukan penanganan perbaikan sekolah, masjid, gereja, jembatan, tanggul, dan pembangunan saluran irigasi di Sungai Sigion. Untuk perbaikan Jembatan Gantung Lumban Soit ditargetkan selesai Desember 2022 ini. Sementara, untuk perbaikan tanggul berdasarkan koordinasi lapangan, tanggal 2 Oktober akan dilakukan menggunakan tanggap darurat APBD Provinsi Sumatera Utara. Jadi, kita berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Selanjutnya adalah bencana longsor di jalan trans Sulawesi Majene Mamuju-Sulawesi Barat pada tanggal 27 Oktober dilakukan penanganan pembersihan material pelayanan kesehatan sanitasi dan air bersih dan penyiapan desain permanen penataan lereng secara menyeluruh. Dan, bencana longsor di Kabupaten Trenggalek-Jawa Timur pada 6 November dilakukan penanganan penggunaan alat berat dan kegiatan padat karya untuk melakukan pembersihan dan melakukan pemotongan pohon yang tumbang. Kami sudah, saya sudah komunikasi dengan Bapak Bupati, sebenarnya di Trenggalek ini yang mengarah ke utara sudah kita tangani, ternyata masih ada bencana yang di sebelah selatannya, ini baru kita sekarang lakukan kajiannya.

Kemudian, bencana banjir di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah pada tanggal 6 September dilakukan penanganan perbaikan alur sungai, proteksi tanggul sungai menggunakan batu *boulder* dan geotekstil sepanjang 500 m dengan progres saat ini sedang terpasang sepanjang 60m. Rencana penanganan permanen akan dimasukkan dalam adendum paket rekonstruksi Jalan Kalawara, Kulawe, dan Sirenja. Bencana gempa di Kabupaten Cianjur yang terjadi pada 21 November, di ikuti dengan gempa susulan hingga 25 November dengan skala kemiringan yang berdampak 16 Kecamatan. Jadi, ini saya kira, kita semua sudah tahu dan tadi yang sempat di sampaikan. Jadi, saat ini memprioritaskan evakuasi dan penyelamatan korban yang tertimbun. Kemudian, yang...yang tadi yang rumah tadi yang ini datanya yang terakhir yang kami sebutkan tadi.

Kemudian, yang selanjutnya Ibu-Bapak sekalian, adalah tindak lanjut Kunker Komisi V DPR RI ke Taman Mini Indonesia Indah.

Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati,

Sejak pertama kali dibuka untuk umum pada Tahun 2000, pada Tahun 1975 tanggal 20 April, Taman Mini Indonesia Indah belum pernah direnovasi secara besar-besaran. Sehingga, kawasannya anjungan provinsi dan bangunan gedung sudah mengalami degradasi, termasuk Danau Archipelago-nya sendiri yang sudah mengalami pendangkalan dan beberapa pulau yang belum termasuk di situ. Dengan mengambil momentum pelaksanaan KTT G20 Taman Mini Indonesia di inovasi untuk mengembalikan marwahnya sebagai *showcase* Indonesia, baik kepada masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Konsep renovasi TMII dibangun berdasarkan narasi ke-Indonesiaan yang akan menjadi wajah baru bagi pengunjung, serta mengangkat ikon Taman Mini Indonesia Indah sebagai salah satu destinasi pariwisata kerakyatan di Jakarta, selain Bung Karno...Gelora Bung Karno dan Kebun Binatang Ragunan.

Selain itu, renovasi Taman Mini ini dikembangkan dengan komposisi 75 hijau dan 30% bangunan. Sehingga, *landscape pedestrian* dan ruang publik menjadi lebih terbuka dan terkesan luas karena sekat-sekat pagar antara anjungan pun sudah dihilangkan. Jadi, pada saat kami mendampingi Pak Presiden, saya menyampaikan, Pak, saya *pingin* Taman Mini menjadi destinasi kerakyatan memang, sehingga orang datang ke situ sudah, masih bisa menggelar tikar dan bawa bontot dari rumah, sehingga kayak di kampung. Jadi, jangan sampai Taman Mini ini menjadi eksklusif dan beliau setuju kemarin hari minggu kemarin baru dicoba 5 ribu pengunjung, sehingga pengunjung tidak boleh lagi pakai mobil pribadi keliling-keliling.

Dalam renovasinya, Taman Mini Indonesia Indah dibagi menjadi 4 zona. Zona klasik pada area depan penerima dengan narasi Indonesia klasik melalui perwujudan bentukan ornamen yang elegan dan geometri serta suasana era kerajaan. Kemudian, zona arsitektur nusantara di area Danau Archipelago dengan deretan anjungan rumah adat dan sekelilingnya menghadirkan unsur tradisi dan budaya. Zona ketiga, yaitu Indonesia kini pada cincin luar Taman Mini Indonesia Indah terdapat bangunan museum milik Kementerian/Lembaga,

salah satunya museum keprajuritan, taman, dan keindahan, dan taman burung. Yang keempat, zona jendela dunia di mana terdapat istana anak-anak Indonesia, diharapkan nantinya pengolah TMII dapat mengembangkan zona ini dengan beberapa bangunan ikonik dunia dengan segala informasinya. Selain menjadi lokasi wisata kerakyatan, Taman Mini Indonesia diharapkan dapat menjadi sarana pemersatu bagi seluruh suku dan bangsa Indonesia melalui keberadaan anjungan rumah adat dan rumah ibadah, serta menjadi sarana edukasi dan wujud kecintaan terhadap tanah air melalui kehadiran museum sejarah dan pengembangan Indonesia. Kementerian PUPR, telah menyelesaikan renovasi Taman Mini dengan lingkup pekerjaan, rehabilitasi seluruh jalan dan penanganan trotoarnya serta drainasenya, sehingga orang sekarang sudah bisa berjalan dengan nyaman dan naik sepeda di trotoar tersebut.

Yang kedua, penataan area gerbang utama, Renovasi Joglo, Sasono Hutomo, Sasono Langen Budoyo dan Sasono Adiguno. Yang ketiga, renovasi Museum Penataan Landscape Anjungan dan Masjid Raya, penataan outer ring road, halter ring dan areal parkir, serta gedung pengelola. Seperti ini Bapak, jadi yang dulu di Tugu Api ini adalah keramik, sekarang kita sudah jadi kan rumput semua jadi kelihatan hijau dan tidak keras, tidak panas, jadi ini kita rubah lantainya menjadi rumput. Kemudian, penataan *landscape* pulau-pulau di Danau Archipelago Pedestrian Anjungan, Amphiteater dan Promenade. Ini dulu ada dua pulau yang kurang, Miangas dan Rote, waktu itu belum ada sehingga kita tambah dengan Miangas dan Pulau Rote. Kemudian renovasi Museum Teater Garuda, Museum Telkom dan Keong Mas, ini juga di depan Keong Mas kita rubah menjadi taman semua. Kemudian, penataan *Landscape Pedestrian Anjungan Feeling Tower*, Kaca Benggala, pembangunan *Community Center* dan penanaman pohon-pohon dari seluruh Indonesia. *Feeling Tower* ini dulu hotel milik Pemda Jabar kita rubuhkan, jadi ini tidak ada lagi sekarang penginapan di Taman Mini, di dalam Taman Mini. Kemudian, struktur parkir *elevated* ini maksudnya supaya ini di (suara kurang jelas) yang tadinya wismanya Pemerintah Daerah, menjadi seperti ini. Kemudian, struktur parkir *elevated* ini supaya mobil semua yang dulu parkir di depan itu menjadi UKM dan sekarang parkirnya terpusat di *elevated* parkir.

Pada tanggal 28 September, Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja untuk meninjau renovasi Taman Mini Indonesia, berdasarkan diskusi dan masukan yang dilakukan beberapa hal tindak lanjut yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Integrasi, pertama, integrasi aksesibilitas ke lokasi Taman Mini masuk dalam Basic Design Teode LRT, yang menghubungkan LRT Cibubur ke Taman Anggrek dan Taman Anggrek ke Taman Mini. Selain itu, telah disediakan pelaksanaan lainnya seperti halte di Pintu 3 untuk pengunjung dengan kendaraan umum dan akses pejalan kaki.

Ini sudah kami tindak lanjuti untuk meminta pengelola LRT antara DKI dan Perhubungan untuk menggabungkan ini dengan teode tadi. Kemudian perbaikan-perbaikan Masjid Attin tidak masuk dalam (*suara kurang jelas*) yang menjadi tugas Kementerian PUPR karena dimiliki oleh yayasan, ini tidak kita tindak lanjuti, karena ini bukan aset negara. Bahkan, kami memindahkan pintu

masuk, karena pintu masuk *existing* masih dimiliki oleh yayasan mereka tidak mau, belum mau bekerja sama sehingga kita pindahkan ke sebelahnya.

Kemudian revitalisasi anjungan dilakukan Pemerintah Daerah selaku pengelola anjungan dengan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri perihal revitalisasi anjungan Pemerintah Daerah di Taman Mini. Terakhir, Kementerian PUPR telah melakukan serah terima kelola kepada PT.TWC pada tanggal 26 Oktober. Jadi, PT.TWC ini di bawah Kementerian BUMN di bawah bendera *in journey* akan mengelola Taman Mini Indonesia Indah ini.

Demikian, Bapak Ketua, Bapak-Bapak Pimpinan Komisi V, Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati. Laporan kami mohon masukkan atas laporan ini dan terima kasih atas kesempatan memberikan laporan kerja pada siang hari ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Menteri.

Saya kira Pak Menteri telah menjelaskan secara terperinci dan saya pikir kita sudah mengerti semua. Namun di sini ada daftar yang cukup banyak di sini dan kalau bisa, tidak bermaksud mengurangi rasa ketimuran kita mungkin hormat-menghormati dikurangi jumlahnya supaya lebih cepat kita. Misalnya hormat yang terhormat Pimpinan, yang terhormat Pak Menteri apa segala panjang sekali pada akhirnya, dikurangi *aja* hormat-hormatnya supaya lebih cepat. Langsung pada pokok perkaranya *aja* supaya lebih cepat. Saya persilakan Pak Soehartono, silakan Pak Soehartono.

F-P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):

Terima kasih. Saya *nggak usah* dihormati, Pak.

**Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri PU, berikut jajarannya yang saya hormati,**

Saya ada titipan dari konstituen, tetapi saya buka buku ini di halaman 5 ini kelihatannya sudah terjawab. Oleh karena itu, yang perlu saya tanyakan kapan rujukan dari Menteri PUPR ini dikeluarkan? Sehingga para konstituen atau para kontraktor kecil-kecil ini segera *nyicil ayem*, bahwa kalau orang Jawa *oh dapat balen, gitu* Pak. Karena mereka di dalam mengerjakan proyek Tahun Anggaran '22 ini, ibaratnya itu apa itu ya, mati tidak tapi hidup juga segan *gitu*, Pak. Karena apa, karena penawaran kurang lebih ya sekitar 75% akhirnya mereka kalau punya alat lengkap misalnya MP dan sebagainya mungkin tidak rugi, tapi bagi mereka yang tidak punya alat tentu sangat merugi itu Pak. Sekali lagi saya ingin kapan rujukan dari Pak Menteri PUPR ini dikeluarkan, apakah Kepmen atau apalah namanya itu yang perlu ditunggu oleh para kontraktor. Saya pikir itu *aja* Pak, titipan dari konstituen.

Makasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Soehartono. Pak Andre, silakan, Pak Andre.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Baik Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V dan seluruh jajaran Anggota Komisi V dan juga Pak Menteri PUPR dan jajarannya.

Pak Menteri ada berapa hal Pak Menteri. Yang pertama, tadi soal Sitinjau Lauik tadi kami sudah mendengarkan paparan Pak Menteri dan juga dalam berapa, satu minggu yang lalu Pak Menteri, kami juga di Komisi VI waktu itu sudah berdiskusi dengan Mitra kami di Komisi VI waktu itu Hutama Karya. Bahwa Pak Menteri, sudah bersurat kepada Hutama Karya untuk memulai studi KPBU, Sitinjau Lauik. Tentu ini kami apresiasi dan ucapan terima kasih sebagai wakil rakyat Sumatera Barat. Kami mengucapkan terima kasih Pak Menteri, bahwa sudah ada solusi konkrit dari Kementerian PUPR untuk penyelesaian permasalahan Sitinjau Lauik di mana akan dibangun *flyover* seperti kelok 9. Dan, harapan kami mendengarkan keterangan dari Hutama Karya harapannya tentu Maret 2023 *insya Allah* studinya selesai dan segera ditender mudah-mudahan harapan kami 2023 ini sudah mulai konstruksi, sehingga betul-betul bisa membantu masyarakat Sumatera Barat. Itu soal Sitinjau Lauik.

Lalu yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, soal surat Pak Menteri kepada Hutama Karya juga, untuk persetujuan dimulainya kembali pembangunan tol Padang Sicincin yang mangkrak satu setengah tahun, kami ucapkan terima kasih sehingga ini bisa jalan ya. Karena saya hitung-hitung Pak Menteri, sebagai wakil rakyat mewakili Sumatera Barat, kalau tol Pekanbaru Padang Pekanbaru itu jalan Pak Menteri, dari wisatawan saja dari Riau itu uang masuk yang masuk ke Sumatera Barat itu bisa 100 miliar per minggu, itu dari wisatawan. Belum lagi transaksi sayur-sayur, buah-buahan atau hasil pertanian Sumatera Barat yang akan dikirim ke provinsi Riau. Jadi, ini penting sekali bagi kami sehingga harapan kami bukan hanya Padang Sicincin yang jalan tapi Padang-Pekanbaru bisa jalan, tapi tentu PR-nya di kami soal pembebasan tanah Pak Menteri.

Lalu yang ketiga, soal pasar fase tujuh yang di pasar raya Padang. Kami mengucapkan terima kasih juga *alhamdulillah* program ini bisa berjalan tahun ini *insya Allah* akan dilelang katanya oleh Bu Diana, Bu Dirjen, akhir bulan ini ya Bu Desember ini di lelang untuk APBN 2023. Kami ucapkan terima kasih perjuangan dari awal, kami waktu itu bersama Pak Menteri Perdagangan waktu itu masih Pak Muhammad Lutfi bertemu dengan Pak Menteri dan *alhamdulillah* ini bisa berhasil. Tapi harapan kami tentu setelah pasar fase tujuh di Kota

Padang selesai tentu pasar bawah di Bukit Tinggi juga menjadi catatan bagi Pak Menteri, supaya setelah fase tujuh di Kota Padang, kalau bisa di APBN 2024 bisa dimasukkan pasar bawah di kota Bukit Tinggi.

Lalu, selanjutnya Pak Menteri ada masukan juga dari teman-teman dari pesisir selatan mungkin, Pak Jarot ini. Ada irigasi lubuk buaya 3.300 hektar di Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan yang mangkrak sejak 2015, Pak Menteri. Jadi, sudah sempat dibangun konstruksinya Tahun 2010 sampai Tahun 2012 sebesar 60 miliar dan ditambah 10 miliar tapi sekarang mangkrak dan sudah terjadi kerusakan di mana-mana. Harapan kami aspirasi masyarakat pesisir selatan yang dititipkan ke kami ini bisa di eksekusi, supaya irigasi yang ada di Air Haji ini bisa kembali diperbaiki dan bisa dipergunakan, karena sejak dibangun di awal tidak pernah dipergunakan Pak Dirjen, Pak Menteri.

Lalu selanjutnya, dari Pak Bupati Pasaman tadi yang menitipkan juga kepada kami, gempa Pasaman itu sudah dibantu dan BNPB untuk rumah rusak berat, 50 juta seperti yang Pak Menteri sampaikan, tapi masih banyak rumah-rumah yang rusak sedang, itu yang belum dibantu perbaikannya di Pasaman maupun Pasaman Barat, Pak Menteri. Dan, pihak Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sudah berkirim surat dan permohonan kepada Kementerian PUPR, harapan kami ini bisa segera dieksekusi oleh, Pak Menteri.

Yang terakhir, Pak Menteri soal MLFF, Pak Menteri, ini penting penerapan *multi lane free flow* di jalan tol. Kami sebagai Anggota DPR melihat Pak Menteri Basuki Hadimuljo, mungkin dalam sejarah Republik Indonesia salah satu Menteri PUPR yang terbaik dalam sejarah Republik Indonesia, iya bukan masuk barangnya fakta. Jadi, kalau yang dibilang Bapak Pembangunan, Pak Basuki. Apalagi kalau dengar pidato Presiden kemarin rambut putih dan berkerut, Pak, *nah* ini bahaya ini bisa-bisa Pak Basuki bisa jadi kompetitor Pak Prabowo juga nanti.

Pak Basuki, sebagai salah satu Menteri PUPR yang dimiliki oleh Indonesia dan salah satu yang terbaik, ya. Terus terang kami sangat mengapresiasi kinerja Bapak dan sangat menghormati Bapak dan sangat sayang dengan prestasi-prestasi Bapak. Tapi, tentu soal MLFF ini jangan sampai ini menjadi PR Bapak, Pak Prof. Danang ada di belakang, PR Bapak apa itu apa. Jangan sampai nanti waktu pensiun dikejar-kejar Pak, ada permasalahan hukum di kemudian hari karena perlu kajian mendalam. Jadi, karena saya sayang dan hormat dengan Bapak saya harus sampaikan di sini. Karena ada pertama, ada penolakan dari Bank Indonesia data yang saya dapatkan. Yang kedua, seluruh asosiasi jalan pengusaha tol juga menolak, kenapa, karena ada fungsi *lost* yang akan besar. Pertanyaan siapa yang bertanggung jawab dengan *lost* yang begitu besar. Apakah nanti misalnya perusahaannya seperti Jasa Marga ataupun Astra atau siapa yang mengelola itu atau Bank-Bank Himbara yang akan bertanggung jawab, ini kan belum jelas. Apalagi kalau kita mendengar keterangan Pak Prof. Danang, Kepala BPJT, bahwa ini disebutkan Indonesia akan menjadi negara pertama yang akan menerapkan metode MLFF untuk angkutan penumpang barang di luar Uni Eropa. Jangan sampai kita jadi kelinci percobaan di mana teknologi ini belum

proven, ya. Saya mengerti dan memahami maksud dan tujuan Pak Menteri, agar transaksi lebih murah dan lebih cepat, sehingga bisa mengurai kemacetan, tapi sekali lagi potensi *lost*-nya begitu besar. Ini jadi catatan Pak Menteri, jangan sampai prestasi Pak Menteri yang luar biasa dan mentereng ini pas pensiun nanti dikejar-kejar oleh aparat penegak hukum, di Pemerintah berikutnya. Ya, tentu sebagai rasa sayang dan cintanya saya kepada Pak Menteri, kayak, yang sudah konkrit bekerja itu saya ingatkan ya. Jadi, potensinya banyak sekali *potensi lost multi lane free flow*, ya. Apakah perlu kita paksakan terhadap teknologi yang belum *proven* ini *gitu loh*, mungkin butuh kajian mendalam lagi, Pak Menteri. Sekali lagi ini rasa hormat dan sayang saya kepada Pak Menteri karena saya tahu persis Bapak orangnya clear dan clean tidak ada aneh-aneh.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Salam.

Makasih, Pak Andre. Pak Andre sedikit beda dengan saya, dia mengatakan Pak Menteri adalah salah satu yang terbaik. Kalau saya tidak ,yang terbaik Pak Menteri kita di sini yang terbaik dia, iya.

Baik Pak Bakri silakan, Pak Bakri.

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Iya terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati,
Pak Menteri yang saya hormati,**

Saya juga menyampaikan bangga dan terima kasih kepada Pak Menteri, kira-kira 2 minggu yang lalu, itu di satu desa yaitu di sungai landai di Kecamatan, di daerah Muara Jambi diadakan pembayaran ganti rugi jalan tol. Ini merupakan satu langkah yang saya pikir ke depan membuktikan bahwa komitmen Pemerintah Pusat betul-betul serius menangani jalan tol Jambi-Palembang, Palembang-Rengan. Karena, sudah berapa tahun saya menunggu Pak Menteri di Sumatera ini di Indonesia ini saya pikir Sumatera khususnya, Jambi *aja* yang belum punya jalan tol, tapi *alhamdulillah* kemarin sudah dilaksanakan pembayaran dan pembebasan ganti rugi. Dan, saya juga atas nama masyarakat Provinsi Jambi menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri.

Satu lagi mungkin Pak Menteri, yang juga di idam-idamkan oleh masyarakat Provinsi Jambi yaitu pembangunan jembatan Sungai Rambut, Pak. Karena jembatan ini betul-betul akan membuka satu Kabupaten di situ ada 3 Kecamatan yang terisolir, yaitu Kecamatan Sadu, Kecamatan Berba dan

Kecamatan Ranta Rasau, yang konon kemarin pada kita rapat terdahulu sudah tertulis di situ akan ada kegiatannya di Tahun 2022. *Nah*, ini juga sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat Provinsi Jambi karena kita tahu bahwa daerah itu betul daerah-daerah terisolir.

Kembali ke Judul daripada rapat hari ini Pak Menteri, tentu evaluasi dengan kegiatan Tahun 2022. Saya juga barusan pulang dari Dapil berkunjung beberapa Kabupaten, *alhamdulillah* banyak kegiatan-kegiatan APBN yang masuk di Provinsi Jambi. Cuma yang menjadi pikiran saya adalah ironisnya itu banyak kegiatan-kegiatan sepertinya agak...agak memungkinkan itu takut terlambat, Pak, terlambat kegiatannya. Karena pada akhir-akhir bulan November ini, Desember ini, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang dengan berbagai alasan oleh rekanan itu dikarenakan cuaca dan kondisi. *Nah*, saya berharap kegiatan-kegiatan itu betul-betul menjadi perhatian. Sebagai contoh yaitu ada jembatan di Sarolangun, yang itu betul-betul jembatan yang lintas, dulu *multiyears* tapi rekanannya *nggak* tahu apa namanya lari itu apa namanya sudah diganti. Terus, dulu juga pernah ada sekolahan di Cipta Karya *alhamdulillah* sudah berjalan bagus hari ini, tapi sempat juga kita selaku DPR RI, jantungan juga, Pak, takut anggaran tidak terserap. Dan, terakhir juga yaitu program di DSDA. *Nah*, saya kemarin mendengar Pak Yudha melalui apa jasa konstruksi *alhamdulillah* sudah mengganti total ya, Pak ya, bahwa BP2JK di Provinsi Jambi itu semuanya udah isinya baru. *Nah*, saya berharap tidak ada lagi terjadi seperti tahun-tahun kemarin proyek itu sudah di umumkan sudah di tenderkan sudah di tunjuk pemenangnya tahu-tahunya rekanan itu *blacklist*. *Nah*, ini menjadi salah satu hambatan penyerapan anggaran yang akan datang.

Terus yang kedua adalah masalah yang akhir-akhir ini juga viral Pak, di Jambi, Pak, yaitu angkutan batubara, Pak. Seminggu yang lalu saya ketemu dengan Menteri Perhubungan, saya sampaikan sama beliau, beliau juga terkejut sedih, melihat habis 220 kilo yang dilalui jalan, 220 kilo jalan nasional yang di lalui oleh batubara itu hampir 50 kilo itu rusak berat, Pak. Dan, saya minta teman-teman itu untuk mencoba menghitungnya nilai perbaikan itu hampir kira-kira 1,1 triliun, kalau itu pun diperbaiki secara umum. Dan, saya coba cek ke ESDM Provinsi Jambi bawa BNPB batubara itu paling akhir sampai Desember ini cuma bisa mencapai 450 miliar, artinya kalau uang itu digunakan untuk perbaikan jalan *tuh* masih tekor Pak, belum lagi uang itu dibagi untuk Pusat, Daerah dan Kabupaten. Oleh sebab itu, saya juga *pengin* meminta Kementerian betul mengambil langkah kira-kira apa-apa yang harus dilakukan, sehingga jangan sampai ini berterusan Pak, jalan rusak dan banyak korban. Korbannya, itu korban jalannya pertama masyarakat yang *stagnan*. Terus terang *saja*, Pak saya kemarin pada saat meninjau lokasi itu ketemu dengan kawan-kawan dari Polisi, yang menjaga di sana hampir 18 ribu kendaraan, 18 ribu kendaraan yang hilir mudik pengangkut batubara, ini jadi perlu betul-betul menjadi perhitungan daripada Pemerintah. Saya takutkan nanti ini, kalau ini diteruskan, boleh jangan sampai nanti jalan kita hancur, *Pak*. *Nah*, jadi mungkin adanya koordinasi Kementerian PU Perhubungan dengan SDM dan saya juga sudah minta melalui Pimpinan Komisi V, kunjungan kerja nanti pada saat reses ini saya berharap bahwa kita akan berkunjung ke Provinsi Jambi, itu perlu menjadi perhatian mungkin, Pak Menteri.

Terus, yang berikutnya adalah masalah judul ini juga bicara tentang banjir. *Nah*, berapa hari minggu yang lalu saya ketemu dengan teman-teman Balai Sumber Daya Air, bahwa di akhir tahun ini akan ada pekerjaan penanggulangan banjir Kota Jambi. Tapi, ironisnya saya mendengar itu baru pekerjaannya sifatnya di pintu air, yang bukan di dalam Kota Jambi adalah maksudnya itu adalah saluran-saluran primer itu yang penting itu. *Nah*, kalau itu tidak dilaksanakan saya pikir pasti masyarakat Provinsi Jambi Kota Jambi akan menikmati banjir lagi kalau masih bicara pintu airnya. *Nah*, ini juga perlu diperhitungkan karena saya dengar itu adalah bantuan JK ya, ini perlu mungkin di *akalka* di...di akali *gimana* caranya supaya ini betul-betul, karena saya menunggu lama sekali Pak, ini kegiatan ini. *Nah*, terealisasi anggarannya di Desember ini, saya dengar cuma hanya bicara tentang pintu air.

Berikutnya adalah di buku ini kita bicara *food estate* Pak, ya. Saya teringat kira-kira hampir 9 tahun yang lalu atau 8 yang tahun lalu, Pak Menteri diangkat menjadi Menteri PUPR, bahwa beliau baru beberapa hari Bapak langsung ke Batang Asai, *nah*, ini pekerjaannya sudah hampir selesai. *Nah*, kemarin saya coba reses ke sana itu sebagai besar di sana bukan lagi lahan pertanian Pak, tapi sudah menjadi lahan sawit. *Nah*, saya takutnya selesai irigasi ini kita upayakan untuk masyarakat pertanian tahu-tahunya, kita kalau bikin irigasi ini tahunya untuk perkebunan-perkebunan perusahaan. Oleh sebab itu, mungkin ada langkah-langkah melakukan cetak sawah ataupun apa, sehingga irigasi yang menelan hampir ratusan miliar ini betul-betul tidak tidak mubazir. Itu *aja* mungkin Pak Menteri, dari saya, terkait gambar-gambar longsor yang tadi di perlihatkan di TV tadi itu di kamera, saya juga menyampaikan bahwa di Provinsi Jambi itu sering sekali terjadi longsor yaitu jalan dari Jambi menuju ke Padang, melalui kota Kerinci. Ini pun juga mungkin perlu menjadikan Pemerintah Pusat untuk menambah anggaran sehingga betul-betul masyarakat Provinsi Jambi yang menuju ke kotanya Pak Andre juga tidak terlalu jantungan.

Itu aja mungkin, Pak Menteri, terima kasih dan sekali lagi terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat terhadap Provinsi Jambi.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Bakri.
Pak Boyman Harun, silakan, Pak.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Terima kasih, Ketua.

Langsung saja, luar biasa memang inilah kalau orang hebat berprestasi dapat sanjungan, dapat pujian apresiasi di mana-mana tidak saja dari Anggota DPR, Pak Presiden juga memuji-muji Bapak Menteri PU ini sebagai Bapak Pembangunan yang luar biasa. Jadi, kalau Pak Sekjen, Pak Dirjen itu mendapat apresiasi dari Pak Menteri, kalau kami Anggota DPR ini Pak,

apresiasinya dari masyarakat, Pak, dari masyarakat. Jadi, kalau seandainya apa yang kami usulkan sebagai tugas kami wakil rakyat terutama berkaitan dengan tugas kedapilan kami *nggak* ada yang mengapresiasi kami Pak, walaupun kami sebenarnya pejabat negara yang duduknya juga sama-sama Bapak di sini. Untuk itu sebagai mitra dengan hormat kami mohon kepada Bapak, tolong hasil reses kami ditindaklanjuti, ini kaitan apresiasi dan tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat terutama di Dapil.

Yang pertama, yang ingin saya sampaikan Pak Menteri, berkaitan dengan masalah Jalan Ketapang Kendawangan, ini tidak bosan-bosan saya sampaikan dari pertama saya duduk di sini saya selalu ingatkan terus. Dan, harapannya selalu ada, harapan selalu ada bahkan kemarin Pak Menteri langsung *ngomong* dengan Pak Dirjen Bina Marga, tolong Jalan Ketapang Kendawangan, Pak Dirjen katakan siap Pak, bahkan bila perlu kita mulai dari depan rumahnya Pak Boy biar Pak Boy elektoralnya bagus di Dapilnya. Itu saya ingat itu. Tapi, saya ingatkan terus jangan sampai Tahun 2023 tetap tidak ada gitu. Karena apa Tahun 2023 ini tahun politik Pak, 24 menurut saya kita sudah tidak lagi berbicara banyak tentang usulan-usulan karena kita sudah sibuk bagaimana meyakinkan konstituen kita.

Bahkan Pak Menteri, secara jujur saya sampaikan dengan Pak Sekjen juga saya sudah japri, Pak, artinya saya sudah sampaikan untuk mengingatkan terus. Karena itu adalah memang kampung halaman saya dan itu adalah tanggung jawab saya setiap saat, walaupun itu jalannya statusnya jalan Provinsi, Pak, dan tanggung jawab Pak Gubernur tetapi perjuangan untuk merubah status jalan nasional juga belum terwujud. Kemudian, dengan Inpres *insya Allah*, Bapak Dirjen itu bisa dilaksanakan, saya pikir itulah tugas kami sebagai wakil rakyat berjuang bagaimana daerah atau Dapil kami bisa maju atau rakyatnya bisa tertolong dengan situasi jalan yang manusiawi paling tidak menurut saya seperti itu. Jadi, harapan saya mudah-mudahan di Tahun 2023 ini, saya mendapat apresiasi dari masyarakat saya di Kalimantan Barat, karena saya sudah melaksanakan tugas dengan baik untuk membuat mereka hidup lebih layak, lebih nyaman dan manusiawi menurut saya jalannya diperbaiki. Itu poin pertama.

Kedua, saya berterima kasih dengan Bapak Menteri banyak juga sudah yang sudah dibangun di Dapil saya, seperti jalan kelik dan tayap itu sekarang lagi dibangun. Harapan saya, 2023 bisa diterusin, Pak Dirjen, karena kalau tidak diterusin nanggung hancur lagi. Karena jalan Kalimantan kalau rusak itu bukan *nanggung-nanggung*, Pak, rusaknya *naudzubillah* rusak benar *gitu*, kalau sampai tidak dilaksanakan. Jadi, harapan saya agar lanjutan dari jalan Sungai Kelik dan Tayap itu bisa di selesaikan atau diteruskan di Tahun 2023. Kemudian, saya juga terima kasih kepada Bapak Djarot, yang sudah menyelesaikan SPAM, apa air baku di Kecamatan Kendawangan yang di persisnya Gudung Kediuk. Saya dapat informasi tidak lama lagi akan diresmikan, Pak, akan diresmikan bahwa pemasangan SPAM-nya sudah selesai, tinggal menunggu Bu Diana lagi ini pemasangan pipa dari pipa induk ke rumah-rumah masyarakat. Harapan saya, ini juga jangan sampai *nanggung-nanggung*, Pak, karena kalau *nanggung* dibangun tetapi tidak *ngalir* ke masyarakat percuma juga, sudah menghabiskan dana yang begitu besar,

tetapi tidak bermanfaat karena tidak di alirkan ke rumah-rumah masyarakat. Jadi, harapan saya tolong diteruskan pelaksanaan pembangunan perpipaan itu mengalirkan kepada rumah-rumah masyarakat. Karena sudah puluhan tahun menunggu masalah air bersih ini sekarang sudah dibangun, Pak, terima kasih sudah mau diresmikan oleh Balai katanya dan sudah bisa mengalir airnya sampai ke Pelabuhan Kendawangan.

Saya pikir itu Pak Ketua, yang ingin saya sampaikan hal-hal lain saya pikir nanti kita sampaikan lagi, tetapi ini yang merupakan menurut saya yang sangat *urgent* dan perlu diprioritaskan. Sekali lagi jalan Ketapang Kendawangan setiap saya pulang, Pak, kadang-kadang malu kalau mau pulang. Mana Boy, *kok* jalannya belum dibangun bangun karena jawaban-jawaban dari Kementerian membuat saya sangat bersemangat, Pak. Perubahan Jalan Status Nasional sudah dijawab oleh Kementerian memenuhi syarat Ketapang Kendawangan, tapi sekarang belum berubah. Ada Undang-Undang Jalan Tahun 2022 belum juga bisa dilaksanakan. Kemudian, ada Inpres menurut Pak Menteri *insya Allah* bisa dilaksanakan dan di iya kan oleh Pak Dirjen, semoga 2023 terlaksana dan ini adalah muka kami sebagai orang yang mewakili daerah kami sebagai Anggota DPR RI, *insya Allah* dengan terlaksana ini mendapat apresiasi. Harapan kami agar kami dapat nama baik seperti Bapak Menteri yang selalu dipuji di mana-mana.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Boyman. Pak Dedi Wahidi, ada Pak Dedi?

F-PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):

Ada, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan-silakan, Pak

F-PKB (H. DEDI WAHIDI, S.Pd.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri, langsung, Pak, saya mau nanya Jalan Tol Cisumdawu, Pak. Kapan ditargetkan selesai, Pak, karena ini akan berdampak langsung kepada Bandara Kertajati, Pak. Kedua, pembangunan irigasi, Pak, irigasi rentang kiri dan rentang kanan Pak, yang sudah lama dibangun itu targetnya kapan selesai Pak, efek daripada Bendungan Jatigede. Yang ketiga, ada lagi pembangunan waduk atau bendungan Cipanas, Pak, kapan ditargetkan selesai. Yang selanjutnya daerah-daerah pemilihan saya, Cirebon-Indramayu daerah pertanian, Pak, lumbung padi nasional. Itu banyak sungai irigasi

maupun pembuangan sedimentasinya tinggi, Pak, sehingga perlu terus-menerus dilakukan normalisasi, Pak. Saya melihat di BBWS Cimanuk-Cisanggarung maupun juga di BBWS Citarum, Pak, alat beratnya sangat terbatas, Pak. Saya mohon alat beratnya, excavator dan yang lain-lain mohon ditambah Pak, termasuk juga biaya operasionalnya, Pak. Karena kalau Pemerintah Desa suruh nanggung biaya operasional itu juga susah, Pak. Saya kira itu Pak Menteri yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Pak. Pak Sumail Abdullah.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pak Menteri dan Ketua yang saya hormati,

Tetap ada, siap, selamat datang di Komisi V, Pak Andre. Tentu saya mengapresiasi catatan-catatan tadi yang disampaikan pada saat apa, Pak Menteri paparkan kaitannya dengan IKN dan progres daripada *food estate* yang telah dilaksanakan. Yang perlu saya sampaikan agar manfaat itu berkepanjangan, tidak mudah rusak dan tentu bisa dinikmati dalam durasi yang lama kaitannya dengan kualitas pekerjaan, Pak. Karena saya ingin bahwa legasi ini yang memang di mana-mana bahwa kita harus mengakui Pak Menteri ini adalah luar biasa *gitu lho*, Pak. Pak Presiden Jokowi juga mengapresiasi dan teman-teman tadi sudah sampaikan juga di mana-mana Pak seperti itu, bahkan terakhir-terakhir ini menjadi kuda hitam, Pak Andre, ya. Mungkin bisa saja menjadi *rival*, ataupun kemudian menjadi apa namanya bukan *rival*, ya, artinya orang-orang ya memang masyarakat Indonesia itu butuh Bapak untuk....

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Cuman Pak, itu rambut putihnya *nggak* cuman Pak Menteri *loh* semua kayaknya putih semua, jadi yang mana *rival*.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Bukan *rival* maksud saya bisa bekerja sama lebih lanjut karena memang dibutuhkan pemikiran dan tenaga dari Pak Menteri yang luar biasa ini.

Yang kedua, Pak Menteri, tadi disebutkan bahwa di musim hujan ini banyak sekali tanah-tanah longsor dan itu menyebabkan terganggunya lalu lintas untuk pergerakan barang dan orang. Saya berasal apa barusan saja dari Dapil tepatnya di wilayah Gunung Gumitir antara Jember dan Banyuwangi, Pak, terdapat longsor yang begitu parah tapi sudah diantisipasi. Maksud kami, karena sudah direncanakan ada jalur lingkaran selatan itu agar segera dipercepat, Pak. Sehingga menjadi opsi untuk kemudian transportasi itu baik umum maupun barang bisa kemudian ada alternatif-alternatif ketika ada musim-musim penghujan ada musim longsor dan lain sebagainya tidak terjadi kemacetan yang berakibat lumpuhnya ekonomi di sana.

Yang berikutnya, Pak Menteri, pertanyaan yang terus disampaikan kepada kami, baik dari Pemerintah Daerah maupun rakyat masyarakat yang di sana kaitanya dengan tindak lanjut jalan tol Probongwangi, yang hari ini terhenti sampai Besuki. Saya mendengar kemarin pada saat Pak Presiden menyampaikan di tengah-tengah musyawarah rakyat bahwa tinggal sedikit saja yang akan tersambung dari Probolinggo ke Banyuwangi. Masyarakat juga ingin kepastian, Pak, sehingga sebelum Pak Jokowi ini berakhir tentu jalan tol itu yang menghubungkan Probolinggo dan Banyuwangi ini bisa terealisasi. Dua hal penting itu saja, barang kali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Pak Menteri dan Pak Ketua, terima kasih karena masih banyak teman-teman yang ingin menyampaikan.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Sepakat Pak, saya Pak Sumail karena memang masih ada hampir 20 ini yang bertanya, sementara jam kita sekarang sudah jam 3 sore. Mudah-mudahan kita jangan perpanjang sudah magrib Pak, kalau bisa sebelum Maghrib sudah selesai.

Baik berikutnya, Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Bismillahirrohmanirohim.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Langsung saja pada Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Pada prinsipnya tentu kita apresiasi apa yang dicapai oleh Pak Menteri sebagaimana apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang lain dan itu adalah fakta dan tidak...tidak bisa dipungkiri. Ada beberapa catatan dalam pemaparan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Yang pertama adalah mohon penjelasan nanti secara detail, adanya penambahan kurang lebih 20 triliun, karena ini tidak dibahas di dalam RAPBN kita, dalam pembahasan yang lalu. Yang lalu itu yang disepakati di ruangan ini 100 triliun lebih dan bertambah 20 triliun lebih, yang sumbernya SBSN, paham SBSN tentu sumber pembiayaan berdasarkan

jaminan aset yang ada, kemudian percepatan PHLN dan penyesuaian rupiah murni.

Ini yang saya harapkan diberikan penjelasan secara detail terhadap penggunaan dana tersebut. Karena ini tidak dibahas pada pembahasan anggaran kita yang lalu, tapi bukan berarti manajemen atau administrasi keuangannya salah, tidak memang begitu adanya. Tapi, pertanyaan saya adalah yang mana objek untuk membiayai dari sumber pendanaan tadi. Kalau yang disampaikan Pak Menteri tadi bahwa ada *real estate*, apa bukan *real estate*, *food estate* sorry dan IKN. Itu juga perlu sedetail mungkin sampai apa yang sampai target mana yang bisa di selesaikan pada tahun ini, karena agak susah kita menilai capaian Bapak, terhadap penggunaan Anggaran Tahun 2022, itu agak susah kita, Pak. Walaupun dikatakan di sini tadi capaiannya 63%, fisik 75, kalau tidak ada angka yang di atas tadi tambahan 20, mungkin sudah 90 atau 80%, Pak, itu Pak Menteri. Karena hari ini kita bicara soal progres capaian anggaran. Ini sangat perlu, karena agak bertentangan dalam pola pemikiran saya, bahwa, apa namanya permohonan anggaran yang kemarin 178 triliun, realisasi 100 yang kita bahas di sini ada *backlog* 70 triliun, ini 70 triliun ini tidak tersentuh barangkali. Sehingga RPJM Bapak, apakah tercapai atau tidak nanti pada sampai Tahun 2024.

Ini...ini bagi saya ini yang penting saya ingatkan kepada kita semuanya khususnya jajaran Kementerian PUPR. Jujur saya menyampaikan bahwa permintaan kemarin itu pada Tahun Anggaran 2022 tahun pertama, awal pembahasan anggaran itu mintanya 175 *backlog* ada 76 triliun. Tambahan ini tidak ada menyelesaikan persoalan *backlog* *nggak* ada *tuh*, Pak.

Saya berharap bahwa, apa yang dicapai oleh Pak Menteri itu dapat apa namanya memberikan hasil paling tidak mengurangi *backlock* tadi. Ternyata apa yang saya lihat, itu tidak mengurangi malah bertambah pekerjaan Bapak, dan memang itu harus di apresiasi dan mendesak, ini...ini yang saya ingatkan, Pak, belum lagi saya mendengar Pak Menteri, mohon penjelasannya. Presiden sudah menyampaikan, Kementerian PUPR sudah menandatangani kontrak pembangunan Istana Negara 2,9 triliun sumbernya dari mana lagi itu, Pak. Apakah dari sini juga, tolong Pak, ya apapun yang masuk, apapun yang masuk di Kementerian Bapak, apa dalam bentuk SBSN apa, hutang luar negeri dan sebagainya harus secara detail sehingga kita bisa melihat, mengevaluasi sampai sejauh mana anggaran itu bisa bermanfaat untuk RPJM, Bapak. Ini perlu bagi saya, Pak, untuk mengevaluasi dan saya jujur menyampaikan sangat senang dan apresiasi dan antisipasi Bapak dan menyelesaikan persoalan dengan tuntas, dalam pikiran saya bapak bekerja dengan 3S (santai, selesai, dan serius) Pak.

Makanya kalau rambut putih juga mau, jadi Presiden *oke lah monggo*. Jadi, Pak Menteri saya hanya itu yang ingin saya sampaikan, karena saya fokus pada persoalan penganggaran ya, mudah-mudahan saya di berikan pencerahan tapi bukan berarti apa yang Bapak lakukan itu bertentangan dengan manajemen keuangan dan alokasi anggaran, tidak, saya hanya semata-mata mau melihat tambahan anggaran 20 triliun itu untuk apa, itu saja *sih* yang penting. Karena saya tahu persis yang kita bahas di sini hanya 100

dan sumbernya yang tambahan ini SBSN dan rupiah murni dan itu pasti bersumber kalau di dalam APBN sumbernya itu pembiayaan utang.

Ini barangkali Pak Menteri, terima kasih apa yang Bapak telah capai saya senang sekali. Kalau saya nonton televisi ya, kadang kala berpindah profesi jadi wartawan juga boleh, Pak Menteri, senang *banget* lihat jadi multi apa namanya multifungsi semuanya bisa *multi talent*. Jadi, saya kira itu Pak Menteri, terima kasih atas kerja kerasnya dan memberikan manfaat untuk orang banyak dan memang itu mendesak. Catatan terakhir tolong diperbesar anggaran untuk persiapan-persiapan bencana karena waktunya sekarang ini kita harus siap-siap utamanya kepada Kepala Balai di daerah masing-masing. Saya di daerah saya setiap banjir saya telepon Kepala Balai sampai di mana, ukurannya bagaimana, *alhamdulillah* terkoordinasi dengan baik.

Makasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Makasih, Pak Hamka. Bu Cen, silakan, Bu Cen.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman, juga Pak Menteri dan jajaran.

Pak Menteri, apresiasi dalam gerak cepat penanganan bencana juga apresiasi sebagai Menteri yang multitalenta. Sebagai fotografer, pemain Band, jangan semua di borong Pak Menteri, yang lain nanti *nggak* dapat. Pak Menteri, mengenai penambahan anggaran 20 triliun yang dipertanyakan Pak Hamka, saya juga ingin menanyakan. Ada penambahan tetapi banyak program Anggota yang berbasis masyarakat itu tidak terealisasi, karena waktu itu kekurangan anggaran jadi mana yang benar ini. Di Dapil saya itu ada program KOTAKU, PISEW, juga temen-temen anggota banyak juga Pak Menteri, tidak terealisasi kare anggarannya sudah habis tiba-tiba muncul ada penambahan 20 triliun jadi tolong dijelaskan.

Juga, Pak Menteri, saya ingin membicarakan mengenai Dapil saya. Di Dapil saya Kabupaten Bintan, ada namanya Kecamatan Tambelan. Daerah itu Pak Menteri, dari Bintan kalau Pak Menteri tahu ke Tanjungpinang perjalanan cuma setengah jam tetapi kalau dari Tambelan ke Tanjungpinang walaupun dia termasuk Kabupaten Bintan itu memerlukan perjalanan laut 1 hari, 24 jam, kalau pesawat 1 jam dan di sana belum ada intervensi Pemerintah untuk infrastruktur. Padahal, kita tahu untuk konektivitas mengentaskan

kemiskinan...kemiskinan kita harus memperbaiki infrastruktur, di situ belum ada intervensi jembatan dan jalan.

Kalau dari Hunian, daerah Hunian harus ke airport yang dibangun dari perhubungan harus naik pompong dan sampai, harus jalan lagi jalannya bukan jalan yang layak. Jadi, saya harap Pak Menteri, melalui Pak Menteri dan Bina Marga tolong di *survei* bisa diadakan jembatan atau jalan untuk konektivitas agar tidak terisolir. Jadi, mohon Pak Menteri menjadi perhatian menjadi prioritas, banyak daerah-daerah kepulauan yang masih perlu bantuan dari pusat. Itu aja Pak Menteri, sekian dari saya terima kasih.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Cen. Pak Djenri, silakan Pak Djenri

F-PDIP (DJENRI ALTING KEINTJEM, SH, MH)

Terima kasih atas kesempatan, rapat kerja yang kami hormati ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Kami mendengar dari Kepala Balai Tani yang ada di Sulawesi Utara, bahwa dalam waktu dekat ini kalau tidak salah bulan Desember ada peresmian 9 bendungan besar ya, di Indonesia. Termasuk salah satu bendungan besar di Sulawesi Utara itu adalah bendungan kuwil. Ya, bagi kami Sulawesi Utara dengan anggaran kurang lebih 2 triliun, di luar pembebasan tanah itu proyek yang luar biasa, ya, karena kan kan di daerah kecil seperti itu. Tetapi, saya mendapat informasi bahwa masih ada permasalahan bendungan tersebut, antara lain masalah pembebasan tanah itu klasik sekali di PUPR selalu itu masalahnya di situ.

Sehingga, saya mewanti-wanti di Kementerian ini agar supaya nanti saat kalau memang sudah mau diresmikan jangan sampai ada masyarakat lagi yang demo karena ujung-ujungnya tanahnya belum bayar dan sebagainya itu. Sembilan saya tidak tahu kalau Pak Menteri nanti akan hadir di sana atau Pak Presiden, karena biasanya bendungan-bendungan yang besar seperti itu biasanya Pak Presiden yang turun langsung.

Yang kedua, Pak Menteri ini masalah BSPS itu yang bantuan rehabilitasi rumah yang ada aspirasi Anggota Dewan. Yang menjadi kendala sekarang untuk mendata itu, maaf ya mungkin teman-teman sudah...sudah terbiasa dengan ini, tapi karena saya baru di Komisi ini. Kendalanya sekarang untuk mendata itu masyarakat sangat sederhana yang sudah mendapat bantuan sosial dari Pemerintah ada banyak macam-macam bantuan sosialnya, justru tidak masuk untuk mendapat bantuan rumah itu, padahal bantuan Pemerintah itu yang sehari-hari sebulan-sebulan itu berapa bulan sekali yang di cairkan, makan saja bagi keluarga yang sangat sederhana itu mereka *ndak* cukup, tapi BSPS ini untuk bantuan rehab rumah itu mereka tidak boleh menerima itu. Tolong dijelaskan kenapa seperti itu, karena bagi saya pikiran saya justru mereka yang mendapat prioritas bantuan pembangunan rumah tersebut, karena memang keseharian mereka hidup mereka itu memang tidak cukup.

Makan saja tidak cukup, apalagi untuk membangun rumah. Saya pernah bicara dengan Kepala Balai di sana, Pak Menteri, dia bilang ini tinggal kebijakan dari Pak Menteri untuk merubah ini. Mungkin khas ini berbeda satu daerah dengan daerah yang lain, tapi di daerah saya Sulawesi Utara justru prioritas untuk mendapat bantuan ini adalah masyarakat-masyarakat kecil itu.

Yang ketiga, Pak Menteri, masalah pembangunan jalan antar Kabupaten penghubung. Di sana, di daerah saya ada daerah-daerah seperti antar Kabupaten Minahasa dengan Minahasa Selatan, sebenarnya ada akses yang sangat dekat untuk di bangun antar dua Kabupaten ini. Saya contohkan salah satu Kecamatan di daerah Minahasa Selatan. Kecamatan itu untuk datang ke satu pasar dia harus lokasinya berkilo-kilo meter jauhnya, tapi justru di lebih berdekatan dengan Kabupaten yang sebelahnya yang lebih dekat tapi akses jalannya tidak ada, berharap dari APBD Kabupaten karena status jalan mungkin.

APBD mereka saja *ngos-ngosan* untuk membiayai itu habis di situ, sehingga saya juga minta kebijakan dari Pak Menteri atau Kementrian ini apakah lewat Dirjenya. Contoh saya untuk Minahasa Selatan dan Minahasa itu ada jalan alternatif di daerah tujuan wisata ya di sana untuk mendapat perhatian.

Yang terakhir, masalah jalan juga, saya mengganti Pak Herson kemarin, Ketua Poksi saya dulu. Ternyata karena masyarakat Sulawesi Utara itu hampir masih 90%, itu petani, andalannya kelapa kopra, cengkeh, vanili dan lain sebagainya. Tapi, akses jalan perkebunan itu *ndak* tahu siapa yang membuat ya untuk mempercepat produksi, petani itu dari kebun sampai di kampung atau sampai di mana untuk mengeluarkan pertaniannya. Apakah itu saat pemetikan, apakah itu saat mau *keluarin* kopranya, tapi jalannya minta ampun sehingga biaya untuk keluar dari situ menjadi sangat mahal sementara komoditas andalan kita seperti pala, cengkeh, kopra, itu harganya turun.

Ini dia jadi membengkak begitu karena akses jalan perkebunan ini yang *ndak* tahu siapa yang mau kerjakan. Seperti tadi saya bilang mau serahkan ke Kabupaten APBD mereka *ndak* mampu, Provinsi juga *nggak* mampu, ya kita sebagai sebagai yang mewakili rakyat bawa ke sini bawa ke Komisi V, bawa pihak Kementerian agar supaya ada kebijakan dari Menteri atau Dirjen untuk menanggulangi jalan-jalan perkebunan ini. Saya melihat tahun kemarin Pak Herson itu bisa itu, bikin jalan akses perkebunan, sehingga Tahun 2023 tadi, mungkin teman-teman tadi juga yang bilang ada surplus sampai 20 triliun itu...itu bisa dikasih ke kita, ke Anggota Dewan ini untuk aspirasi mereka laksanakan di daerah.

Yang paling terakhir, mohon maaf Pak Pimpinan, ini evaluasi juga. Ini jalan nasional di sana saya lihat dan masyarakat juga mengeluhkan, apabila ada rehabilitasi atau pemeliharaan jalan nasional itu jalan itu *dilobangi* hari ini nanti berbulan-bulan di diperbaiki. Kenapa mesti begitu, sementara tingkat kecelakaan di jalan Trans Sulawesi itu cukup tinggi, sudah banyak belum lagi kendaraan yang rusak. Karena jalannya sudah dilubangi tinggal mau direhab tinggal mau di adakan pemeliharaan, tapi waktunya sangat lama. Tapi saya

lihat kalau jalan tol ya kalau di sini jalan tolnya malam dibuat paginya sudah bisa dilewati, mulus.

Memang ada perbedaan peruntukan jalan tol itu untuk yang sangat penting atau jalan negara itu yang ada di daerah itu ya nomor dua *lah* itu. Cuma orang daerah juga yang jalan kalau di jalan tol kan ada pemasukan negara di situ Bina Marga dan lain sebagainya. Jadi, saya minta pihak Bina Marga ini yang khususnya di balai sana itu, memperhatikan itu. Karena celaknya di situ apakah kita ada ganti rugi kalau celaka, belum mobilnya rusak dan lain sebagainya. Jadi, kita kira ini saja yang bisa saya sampaikan, Pak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak. Sebetulnya saya mohon maaf Pak Menteri, ya yang kita bahas ini kan sebenarnya adalah menyangkut apa namanya, resapan anggaran, kemudian IKN, kemudian *food estate* dan sebagainya. Tadi, banyak teman-teman menyampaikan juga aspirasinya di Dapil. Jadi, mohon maaf Pak, ya itulah keadaan kondisi kita yang ada di sini sekarang ini.

Baik berikutnya, Pak Sudewo, silakan Pak Sudewo.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan. Langsung saja saya *surprise* ketemu Pak Menteri kali ini dalam kondisi sehat. Karena kesibukannya Pak Menteri ini luar biasa, dalam berbagai kegiatan kenegaraan, kegiatan Pemerintah baik di internal Kementerian PUPR maupun di luar Kementerian PUPR, Pak Menteri selalu ada, saya akan selalu doakan supaya Pak Menteri selalu sehat *walafiat*.

Pertama, saya ingin menambahi dari apa yang disampaikan oleh kawan saya Pak Bakri, yang terjadi kemacetan lalu lintas di Provinsi Jambi yang sangat luar biasa parahnya, itu saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris BPJT Pak Yongki. Dia pernah menghitung kemacetan lalu lintas di jalan tol akibat pintu tol, pelayanan pintu tol, yang masih konvensional itu mengakibatkan kerugian sekian triliun begitu, ya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau itu terjadi di suatu tempat ditempat yang lain, seperti di Provinsi Jambi yang sehari-hari terjadi kemacetan.

Mengapa ini kami tanyakan kepada Pak Menteri, karena saya pernah punya pengalaman, di Kalimantan Selatan itu ada tambang batubara yang sama sekali tidak diizinkan oleh Kementerian PUPR karena mengambil sebagian dari bagian jalan raya akan dilalui oleh angkutan batubara sama sekali tidak diizinkan, ya, mengapa yang di Jambi itu sampai separah ini. Jadi, saya hanya ingin mengingatkan kepada Pak Menteri PUPR, supaya ada penegakan hukum yang berkeadilan yang berpedoman terhadap Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Dari Jalan Raya.

Mungkin ini, sudah ditindaklanjuti oleh Dirjen Bina Marga bagaimana sebagai...sebagai *Leading Sector* untuk mengatasi persoalan ini atau tidak, karena kita ini kan berbicara dalam konteks nasional. Kami tidak menginginkan ada bagian dari wilayah Republik Indonesia ini ada satu kerugian berdampak perekonomian yang tidak bagus oleh karena kemacetan semacam ini. Jadi, saya hanya mengingatkan kepada Pak Menteri PUPR.

Yang kedua, saya mengingatkan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga supaya ditingkatkan metode dan manajemen pembangunan konstruksi jalan maupun jembatan. Jangan *sampe* dampak dari pembangunan jalan dan jembatan ini juga terjadi satu kemacetan yang parah, seperti yang dialami oleh Dapil kami di Kabupaten Pati Kecamatan Juwana, sedang pembangunan jembatan itu setiap harinya sampai puluhan kilometer terjadi satu kemacetan akibat pembangunan jembatan yang hanya 1 unit 1 titik, di Juana. Barangkali metodenya itu dibuat sedemikian rupa supaya bisa lebih cepat dan supaya walaupun itu berdampak pada suatu kemacetan jangan sampai terlalu lama.

Yang ketiga, saya ingin mengingatkan kepada Pak Menteri PU bahwa bencana gempa, itu kan sering terjadi di tanah air. Gempa memang tidak bisa di mitigasi kapan akan terjadi gempa tapi *track record* terjadinya sebuah gempa itu bisa di...di data, bahwa daerah mana saja yang sering terjadi gempa. Sehingga, langkah-langkah antisipasi supaya, apabila terjadi suatu gempa pada pada daerah tersebut tidak akan berdampak begitu parah, ya.

Yang saya ingin maksudkan adalah, bagus apabila Kementerian PUPR itu membuat satu perencanaan bangunan tahan gempa. Jadi, bangunan baik itu yang sifatnya sederhana sesuai dengan status ekonomi masyarakatnya baik itu bangunan yang statusnya atau berskala besar atau menengah *gitu*. Jadi, kalau itu ada satu panduan dari Kementerian PUPR disosialisasikan kepada seluruh warga yang sering terdampak bencana gempa mungkin ini bekerjasama dengan daerah-daerah dengan Pemerintah Kabupaten sehingga ada satu pilihan konstruksi yang di ambil oleh masyarakat bila dia akan membangun satu rumahnya atau membangun satu konstruksi, yaitu disesuaikan dengan saran daripada Kementerian PUPR. Dan, apabila itu pembangunan yang untuk institusi Pemerintah yang di danai oleh Pemerintah, baik itu APBN maupun APBD alangkah baiknya setiap konstruksi itu di dasarkan pada desain konstruksi tahan gempa yang dibuat oleh Kementerian PUPR, mungkin ini acuannya adalah Peraturan Presiden, karena yang mempedomani peraturan ini terhadap oleh semua institusi tidak hanya pusat.

Kemudian, yang berikutnya adalah MLFF dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V bersama Dirjen Bina Marga dan kepada dengan BPJT, saya sudah menyampaikan dampak dari pada MLFF ini. Satu trobosan memang yang akan dilakukan oleh BPJT dan akan dilakukan oleh Dirjen Bina Marga tetapi ini...ini masih mengandung spekulasi yang sangat tinggi. Karena belum ada satu negara pun yang menggunakan metode ini, itu dikatakan satu berhasil. Tadi, yang disampaikan oleh kawan saya Pak Andre Rosiade itu memang mengingatkan kepada Pak Menteri dan mengingatkan kepada kita semua, oleh sebab MLFF ini ya masih banyak sekali kelemahannya. Utamanya apa di Indonesia ini banyak kendaraan hantu, banyak mobil hantu, truk hantu

yang plat nomornya itu belum tentu teregistrasi secara resmi. *Nah*, apabila itu misalnya tidak bisa terdata untuk melakukan pembayaran siapa yang akan dirugikan adalah badan usaha jalan tol ya. *Nggak* masalah kalau memang ini mau dilakukan tetapi setidaknya akurasi data ya, ini dikaji secara matang jangan sampai berdampak secara luas.

Kemudian, saya juga menyampaikan kepada Pak Menteri ini memang tepat untuk kami sampaikan kepada Pak Menteri PUPR. Kami pernah RDP dengan Dirjen Perhubungan Udara dengan Angkasa Pura 1 sebagai pengelola Bandara Kertajati. Hasil studi dari mereka lakukan mengapa Bandara Kertajati tidak bisa operasional seperti yang diharapkan, faktor utama adalah *nggak* ada akses dari kota Bandung sampai Bandara Kertajati yaitu terlambatnya pembangunan jalan tol Cisundawu. Kalau pembangunan Cisundawu ini...ini bisa beroperasi katanya, Bandara Kertajati akan beroperasi sesuai dengan harapan. Maka ini akan saya mintakan kepada Menteri PUPR untuk menjadi diskresi agar jalan tol ini segera dilaksanakan. Kemudian, yang terkait dengan daerah pemilihan saya Pak Menteri. Saya terima kasih Pak Menteri telah menganggarkan dan sekarang sudah dilakukan pekerjaan Bendung Karet. Ini memang perhatian besar Pak Menteri PUPR terhadap daerah pemilihan saya. Karena Bendung Karet ini Bendung Kembang Kempis ini sangat diharapkan oleh warga.

Yang berikutnya adalah pembangunan...rencana pembangunan jalan tol Demak-Tuban. Pertengahan Tahun 2021, pernah saya tanyakan kepada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Dirjen Bina Marga bahwa di akhir Tahun 2021 studi itu sudah di laksanakan sudah akan selesai, tetapi kemarin saya tanyakan lagi awal 2022 katanya akhir 2022 studi rencana pembangunan jalan tol Demak-Tuban itu akan selesai. Apakah akan selesai benar atau tidak ini ya, saya minta supaya jangan sampai tertunda kembali mengingat kemacetan luar biasa. Mungkin Pak Menteri, sudah sangat tahu pak Dirjen sangat tahu, sebagian besar jajaran Pemerintahan dari Kementerian PUPR sangat tahu, di sana kemacetannya sangat luar biasa. *Backbone* perekonomian di Pulau Jawa ya ada di sini, jadi sangat disayangkan kalau pembuatan jalan tol di sini ini, menjadi tidak serius penanganannya oleh Pemerintah. Jadi, saya berharap supaya studi ini bisa segera diselesaikan dan skema pembiayaan terhadap jalan tol Demak-Tuban itu nanti seperti apa. Apakah ini APBN, dukungan Pemerintah APBN ataukah itu *loan*, ataukah ini KPBU ya investor murni atau bagaimana, supaya bisa secara paralel untuk dipersiapkan.

Berikutnya adalah, Pak Menteri, mohon maaf sekarang ini sebenarnya bencana banjir terjadi di mana-mana. Yang terekspos di media di media *mainstream* seperti di TV One, Metro TV, Kompas TV, dan semacamnya itu, itu adalah bencana banjir yang berskala besar terjadi di Provinsi-provinsi atau di Kabupaten-kabupaten. Tetapi, sesungguhnya bencana banjir yang terjadi di skala Kecamatan itu meluas di mana-mana. Apakah ini faktor penyebabnya oleh karena sistem drainase atau pendangkalan sungai kecil-kecil itu? Belum tentu. Bisa juga disebabkan oleh karena normalisasi sungai besar yang itu menjadi kewenangan Kementerian PUPR menjadi terlambat, sehingga berdampak terhadap anak sungai terdampak pada cucu sungai. Kalau cucu sungai, anak sungai menjadi banjir oleh karena sungai induknya, kan ya logis

dong yang bertanggung jawab ini, tapi saya tidak akan memetakan itu Pak Menteri mohon maaf. Saya tidak akan menyalahkan dari jajaran Kementerian PUPR karena apa, karena Kementerian PUPR melalui BBWS sudah berbuat banyak terhadap hal ini, membantu sangat luar biasa tetapi faktanya masih kurang. Akan lebih baik kalau Pak Menteri PUPR mohon maaf bisa menambahkan jumlah alat berat Pak di OP di masing-masing BBWS. Karena keterbatasan jumlah alat berat ini memang sangat berdampak sehingga menjadi terlambat dalam penanganan dan dampaknya adalah bencana banjir semakin meluas. Ini model bantuanlah dari Pak Menteri saya berharap ini bisa ditingkatkan.

Yang terakhir Pimpinan waduk Kedung Ombo, waduk Kedung Ombo ini terasa sekali manfaatnya untuk di daerah Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, di daerah saya Pak Menteri dan jaringan irigasinya itu sudah terbangun sudah terbentuk primer, sekunder, tersiernya sampai kecil-kecil sudah terbentuk. Tapi, sayang kapasitas bendung bendungan Kedung Ombo ini, belum memenuhi semuanya setiap saat waktu dibutuhkan, ya. Masih ada satu waktu, kurun waktu tertentu yang itu *blank* tidak bisa teraliri artinya digilir. Akan lebih baik kalau jaringan irigasi yang sudah terbangun secara masif ini pemanfaatannya secara optimal dengan menambah kapasitas Bendungan Kedung Ombo. Saya *nggak* tahu apakah ini masih bisa ditambah kapasitasnya atau tidak saya *nggak ngerti* karena sifatnya teknis, barangkali Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang paling tahu.

Ini hanya tambahan saja yang terakhir, saya itu pernah Pak Menteri WA, Set Dirjen Cipta Karya, telepon berkali-kali tapi tidak diangkat WA juga saya izin mau telepon tapi, hanya dibaca saja. Jadi, saya mohon maaf ini Set Dirjen Cipta Karya itu ada *nggak* ya. Saya kira itu ada tambahan *aja* itu, Pak Dirjen *nganu* Bu Dirjen, terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sudewo. Pak Eddy Santana silakan, Pak Eddy.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langsung saja, Pak Menteri, beserta seluruh jajaran. Mungkin perlu penjelasan lebih detail *gitu* masalah MLFF ini. Saya kira ini bagus hanya perlu penjelasan lebih lanjut dan dicarikan teknologi yang paling pas untuk kondisi kita *gitu, nah* ini kan sama aja. Kita pakai elektronik tol kartu gitu ataupun pakai elektronik *on board* unit *gitu*. *Nah*, ini saya kira lebih...lebih maju *gitu* tanpa berhenti, tanpa nempelkan kartu kita sudah bisa terbuka gerbangnya, mungkin ini perlu penjelasan lebih detail saja ini, Pak. Jadi kita harus lebih maju, mungkin kalau untuk truck-truck ada jalan khusus masih pakai E-Toll tapi kalau untuk kendaraan yang lebih cepat bisa, saya kira bisa dilakukan ini. Begitu kendaraan

masuk pada jarak tertentu gerbang terbuka *gitu*, jadi *nggak* ada kebocoran di situ saya kira. *Nah*, ini yang perlu penjelasan, Pak.

Kemudian, yang kedua masalah bencana, Pak, kita banyak sekali bencana. Saya juga sempat ke Cianjur *gitu* ya, tadi benar penjelasan Pak Menteri *gitu* artinya prihatin sekali, Pak, prihatin sekali masalah konstruksi Pak dan yang konstruksi tidak standar itu hal yang *ndak* mampu, Pak, ya ini yang yang jadi masalah. Yang bangunannya kokoh oke pembesian *gitu* pakai kolom balok ya tidak separah itu *gitu* tidak langsung. *Nah*, inilah mungkin tadi dari teman-teman berikan masuk.

Ada baiknya ke depan Pak Menteri *gitu*, memberikan sosialisasi *gitu* setiap di kantor desa *tuh* ada ini *lho* cara bangun yang benar. Jadi tipe 36, 45, 54, itu sudah ada ini *lho* pembesannya, harus ada kolam harus ada. *Nah*, walaupun itu ya perlu perlu dana yang lebih besar, tapi kan masyarakat bisa juga membuat rumah-rumah, tumbuhlah rumah tumbuh *gitu*, kecil dulu terus besar-besar *gitu*. *Nah*, ini jadi tidak sampai ambruk begitu *gitu* langsung itu, inilah yang terjadi kemudian longsorannya, Pak. Jadi, *line sliding* itu ya desa yang lama-lama yang ada di pinggiran bukit itu, yang harus kita pindahkan sebetulnya, relokasi, tertimbun 5 meter Pak, bagaimana itu, kemarin itu aduh prihatin sekali. *Nah*, jadi kita semua tentu ingin membantu, kebetulan saya sendiri agak dekat *gitu* ya, rumahnya jadi saya buka posko di situ Pak, hanya kurang tenda-tenda tadi memang dibutuhkan itu. Sekarang ini tenda tempat tidur *ndak* perlu tempat tidur yang ini, selimut *gitu*.

Kemudian, makannya, Pak, ini kan kalau kita juga *drop* ke posko induk misalnya bantuan-bantuan itu beras dan sebagainya kadang-kadang *ndak* terbagi Pak, di situ sulit *gitu*. Ini tempatnya ratusan...ratusan tempat Pak, ini lokasi *gitu* perlu posko-posko kecil. *Nah*, ini kalau kita ke teman-teman semua kita semua membantu lebih baik buka posko yang kecil-kecil juga *gitu*, nanti bisa dimintakan oleh posko induk, apa sembakonya *gitu* tapi ada alat masak *nggak* bisa masak lagi Pak, orang itu rumahnya *nggak* ada lagi dan kelaparan, ada yang kelaparan...kelaparan *nunggu* dulu *gitu* ya. Ini prihatin sekali. Supaya ke depan mari kita sama-sama itu ya sosialisasikan. Saya mohon juga PU, turun tangan ini masalah sosialisasi sampai ke desa *gitu*. Indikator desa itu ada persyaratan-persyaratan membangun rumah dan juga kita lihat kalau yang tadi sekali lagi yang di pinggiran bukit ya, terpaksa harus kita relokasi itu, *resettlement* relokasi.

Nah, kemudian di Dapil, Pak, terima kasih, Pak. Jadi, saya dengan anak buahnya Pak Edi Pak, Kepala Balai jalan itu, anak buah Pak Menteri juga. Karena setiap hari itu masuk, Pak, masuk berita itu, ada jalan yang berlumpur sekali. *Nah*, coba mari kita, sebelum kita pergi ke sana ke tempat Bupati langsung Sekayu Mangun Jaya, *eh* maaf Betung Sekayu Sekayu Mangunjaya, *nah*, kita langsung ke sana apa yang terjadi di lapangan kita lihat. Kita ajak LSM-nya, kita ajak Pers-nya dan kami ke sana Pak, disiapkan mobil mereka itu *ndak* ada yang seperti diberitakan, Pak, *udah* bagus *udah* lancar itu, saya bilang ini yang diberita lumpurnya di mana ternyata jalan minyak, Pak. Kalau jalan minyak dipakai sendiri *gitu* jalan-jalan tambang ya bukan jalan nasional kita ya. *Nah*, ini...ini *clear*-lah masalah itu ketemu Bupati juga, hanya memang

perlu percepatan, sudah dijelaskan oleh Kepala Balai bawah ini sampai Tahun 2024. Jadi, akan semakin baik, semakin baik, jalan tersebut, jadi terima kasih Pak, atas nama masyarakat juga Bupati nyampaikan, salam.

Kemudian, masalah IKN, Pak. Saya juga tadi sempat disampaikan teman-teman hanya perlu...perlu laporan juga yang lebih lebih rincilah. Ada tambahan dana bagaimana *gitu*, ada sudah dikerjakan atau sudah di lelang dini sehingga tidak jadi pertanyaan-pertanyaan di kita *gitu*. Kami mendukung kami sangat mendukung dan ya harus semuanya itu berjalan dengan semestinya memang perlu ada dari Pak Menteri dari jajaran PUPR mungkin ada diskresi ya, tapi juga harus *nampak* dilaporkan ke Komisi V, saya kira ini saja.

Kemudian, *food estate* Pak, sekali lagi pernah saya sampaikan Pak, kita harus ada *monitoring* evaluasinya, Pak. Jadi, memang bukan Pak Menteri PU sendiri *gitu* urusan ini, ada Menteri Pertanian, *nah*, Pak Menteri membuat infrastrukturnya terus ditanami *gitukan* ditanami, apakah sudah berhasil itu untuk yang baru apalagi daerah baru *tuh* daerah rawa pasang surut gitu ya. *Nah*, saya sekali lagi mohon yang lama...lama itu diperhatikan, Pak, seperti Banyuasin itu rehabilitasinya sudah sangat perlu, *gitu*. Rencana kita dulu 400.000 hektar, sekarang terbangun 200.000 hektar lebih dan itu salah satu lumbung pangan itu Nomor 5 kita di Indonesia. Nah, yang...yang seperti seperti ini, mohon...mohon diperhatikan jadi kita *nggak* kekurangan pangan Pak, pasti banyak sekali *supply* dari sana kalau infrastruktur irigasi jaringan rawannya diperhatikan, masih banyak juga Pak, lahan-lahan tadi sampaikan juga yang ada banyak terjadi konversi dari dari pertanian dari sawah ke sawit, Pak. *Nah*, beda tempat kami sama juga tapi sekarang ini banyak investor membeli lahan-lahan yang kosong yang harusnya cocok untuk persawahan. *Nah*, sehingga masyarakat ya, kalau kita lihat yang pertaniannya sudah jadi di Banyuasin dia makmur, Pak, tapi kalau yang menjual tanah paling-paling 30 juta ya, tetap saja miskin 30 juta habis 1 ha 30 juta habis ya miskin lagi dia. Artinya, mulai sekarang kita selamatkan lahan-lahan kosong jangan semua jadi kebun kelapa sawit.

Saya kira ini saja, Pak. Makasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Eddy. Pak Bob Andika silakan, Pak.

F-PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.)

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri yang saya hormati beserta seluruh jajaran,

Saya langsung saja tadi setelah saya lihat paparan Pak Menteri, saya apresiasi atas evaluasi pencapaian Pak Menteri di APBN Tahun 2022, saya langsung saja, Pak Menteri.

Pertama, mengenai *food estate* Pak Menteri. Saya sudah ke Humbang Hasundutan, Pak Menteri, luar biasa infrastruktur yang Pak Menteri bangun ke Humbang Hasundutan ini. Mengenai teknik infrastrukturnya cukup berhasil saya yakin Pak Menteri, tapi mengenai teknik pertaniannya saya belum yakin. Tapi, ini kan pasti berjalan bersamaan Pak Menteri, tapi kita takut ke depan ini *food estate* ini, yang dilihat orang kan tidak teknis infrastrukturnya saja pastikan teknik pertaniannya juga, Pak Menteri. *Nah*, ini bagaimana koordinasi dengan pihak Kementerian Pertanian ini nanti kita lihat bagaimana 2 Kementerian ini bisa bersinergi tapi kalau dengan infrastrukturnya luar biasa atas pembangunan Pak Menteri terhadap *food estate*.

Selanjutnya, Pak Menteri, saya lihat tadi juga atas bantuan Pak Menteri terhadap *land clearing food estate* di Humbang ini, ada 10 unit *excavator*, Pak Menteri, ini telah saya sampaikan juga pernah ke Pak Dirjen mengenai 10 alat berat ini perlu judul evaluasi Pak Menteri. Kenapa, karena pernah saya kunjungan ke sana ada disampaikan masyarakat ada beberapa hal-hal yang tidak bagus. Tolong ini dievaluasi Pak Menteri, alat berat ini 10 ini, apabila alat berat ini tidak kira-kira udah selesai *land clearing*-nya, apakah alat berat ini memang dihibahkan ke Kabupaten itu atau nanti akan ditarik ke Kementerian. Kalau tidak dihibahkan Pak Menteri, apakah lebih bagus ini diberikan kepada Pemda-Pemda yang membutuhkan sekarang, di Sumatra Utara itu yang sekarang tiap tahun memang betul-betul terdampak banjir tahunan Pak Menteri, yang betul-betul memang tidak bisa kita tangani dengan APBN kita. Karena kita sama-sama tahu memang APBN kita ini tidak cukup untuk menangani sungai dari hulu sampai hilir. Karena kalau kita tangani saja hilir kalau *nggak* kita tangani hulu sama dengan. Kita tangani juga hulu kalau tidak kita tangani hilirpun, ini sama dengan. Kalau kita tangani dua-dua APBN kita *nggak* cukup, kita paham itu Pak Menteri, tapi Pemda sekarang sangat membutuhkan alat berat itu, Pak Menteri. Seperti Pemkab Serge Pak Menteri, satu aja alat berat itu yang dari Pemkab Humbang itu aja kita hibahkan ke Pemkab Serge, luar biasa ucapan terima kasih kepada Pak Menteri. Daripada 10 di Humbang *nggak* dipakai yang takutnya kita akan digunakan yang tidak baik di Humbang Hasundutan, Pak Menteri.

Seperti juga di Simalungun membutuhkan longsor sering terjadi di Pemkab Karo, karena jalan Medan Berastagi sering longsor, Pak Menteri. Karena kita sangat membutuhkan itu pemkab-pemkab itu Pak Menteri. Saya sering koordinasi dengan Balai, Pak Kepala Balai BWS, anggaran kita memang tidak cukup. Kalau memang kita cerita anggaran memang sampai kapanpun kita *nggak* cukup Pak Menteri, tapi kalau kita berikan bantuan alat berat itu Pak Menteri mereka Pemkab ini pasti mempunyai anggaran untuk merawat alat berat tersebut, mungkin ini yang perlu kita bisa perhatikan, Pak Menteri. Untuk apa alat di Humbang Hasundutan itu sampai 10, Pak Menteri dan *land clearing*-nya kan sebentar lagi akan selesai. Mungkin ini sedikit evaluasi Pak Menteri, saran dari saya Pak Menteri. Kalau masalah teknis pasti Pak Menteri yang akan lebih tahu dan saya mohon kepada Pak Menteri ini sebagai evaluasi supaya alat berat itu tak...tidak perlu lama-lama di sana karena sudah saya minta saran dari Pak Dirjen untuk disampaikan kepada Pak Menteri.

Mungkin ini sedikit dari saya, saya ucapkan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak. Pak Syahrul Aidi silakan, Pak.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Makasih, Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi V dan Pak Menteri beserta jajaran. Saya harus juga mengapresiasi ini Pak Menteri dengan kinerjanya saya yakin beliau ini capek karena dari lokasi bencana dan banyak lagi beban-beban kerja yang harus beliau laksanakan. Tapi, saya perhatikan, saya amati tadi memang petinggi-petinggi Kementerian PU ini pada putih semua rambutnya, kecuali Pak...Pak Sekjen kayak mungkin dicat mungkin, ya. Pak Menteri tadi dari paparan Pak Menteri, sudah banyak kritikan dari teman-teman masukkan sebetulnya melihat begitu banyaknya beban kerja yang mesti dilaksanakan oleh Pak Menteri saya agak berat juga menyampaikan keluhan masyarakat, tapi mesti saya sampaikan sebagai wakil dari pada rakyat tentunya khususnya masyarakat Riau.

Pertama, Pak Menteri untuk kegiatan kita yang sifatnya infrastruktur berbasis masyarakat PAMSIMAS. *Alhamdulillah* itu luar biasa manfaatnya bagi masyarakat tentunya dan kita tetap komitmen untuk bisa tetap kita lanjutkan. Cuma saja catatan Pak Menteri, untuk tahun ini memang ada peningkatan anggaran ya, ya Bu Sekjen ya, peningkatan anggaran kalau *ndak* salah dulu 250 atau 300, sekarang menjadi 450 kalau tidak salah. Cuma saja saya sayangkan peningkatan anggaran ini, itu efeknya pada peningkatan volume SR-nya. Saya berharap peningkatan anggaran ini adalah juga untuk menangani air yang tadinya tidak layak atau tidak bersih menjadi bersih, Pak. Tadi beberapa catatan saya saya kunjung, berkunjung ke beberapa desa yang mendapatkan PAMSIMAS dan kemudian tidak dimanfaatkan oleh masyarakat desa, karena kegiatan PAMSIMAS ini hanya memindahkan air dari sumbernya ke tangki Pak, dan sampainya ke masyarakat belum menjadi air yang layak atau yang bersih, Pak. Jadi, berharap ke depan kebijakannya agak *flexible*, kalau airnya bersih silakan saja ditambah SR-nya tetapi untuk yang tidak bersih agar ada teknologi yang sederhana untuk bagaimana mengolah air itu menjadi air yang layak atau yang bersih, Pak. Ini catatan.

Yang kedua, untuk MCK pondok pesantren ini dan pendidikan keagamaan ini sangat besar-besarnya manfaatnya bagi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, Pak. Dan, ucapan mungkin terima kasih dari pondok pesantren khususnya dari Riau kepada Pak Menteri, sangat membantu mereka. Dan, hanya saja catatan Pak, ada beberapa pondok pesantren ada pendidikan keagamaan yang mereka MCK-nya dibangun tapi sumber airnya tidak ada. Jadi, kalau bisa ini ada MCK berbasis pesantren kalau bisa pendidikan keagamaan agar sempurna bantuan kita untuk penanganan sanitasi ini agar ke depan apakah 2024, ada program untuk ya, semacam

PAMSIMAS atau apa, atau sumur bor untuk pondok pesantren Pak berbasis pondok pesantren.

Kemudian, yang ketiga adalah pengaman tebing Pak, sungai. Saya kemarin dengan teman-teman ke Bekasi, menemukan di sana di Bekasi itu buat pengaman tebing sungai itu, bahkan di naikkan tebingnya itu bukan hanya di tanahnya sampai sekian meter ke atas untuk mengamankan masyarakat sekitar Bekasi itu agar tidak terkena banjir, Pak, agar tebing mereka tidak runtuh dan tidak terkena banjir 500 hampir 500 miliar saya lihat.

Nah, mohon maaf Pak saya selalu harus menyampaikan bahwasanya di Riau itu untuk sungai besar saja lima, belum lagi sungai kecilnya anak sungainya dan seterusnya. Saya mendapat tahun ini hanya sekitar 5 titik saja Pak, berarti kasusnya itu kalau boleh saya katakan itu sampai 100-an, Pak. Dan, yang agak ironis lagi bahwasannya untuk tahun depan, tahun ini dan tahun depan tidak ada perencanaan, anggaran perencanaan, Pak. Ini mohon perencanaan untuk yang saya kunjungi yang saya diminta oleh masyarakat karena tahu Anggota DPR RI yang memang apa namanya di letaknya di Kementerian PUPR dan mereka tahu saya Komisi V saya diminta untuk turun setiap desa itu saya turun. Cuma ketika diusulkan untuk pembangunan belum ada DED-nya. Dan, DED itu untuk Tahun 2023 tidak ada lagi dianggarkan, jadi mau dibangun kapan Pak, ketika kita mau bangun tahun depan tidak ada DED-nya kemudian tahun depan tidak ada anggaran DED, ya, berarti tidak akan pernah kita bangun, begitu juga untuk program tadi Embung dan seterusnya.

Jadi, mohon catatan yang paling penting saya ingin sampaikan Pak, ini ada beberapa kasus-kasus yang kemudian saya turun ketika Reses mesti dibangun, tetapi belum ada DED-nya mudah-mudahan 2023 ini bagaimana caranya agar minimal DED-nya itu bisa dilaksanakan. Kemudian, terakhir Pak Menteri, pendamping Pak Menteri. Kalau tidak salah untuk rehab rumah BPS, mereka hanya digaji selama 4 bulan yang mana sebelumnya 6 bulan. Saya, mereka menyampaikan kepada kami, minimal Pak, katanya kami itu digaji 5 bulan, karena 4 bulan itu ada kegiatan yang kami lakukan kami tidak digaji. Jadi, kalau 4 bulan itu terlalu singkat dan akhirnya ada 1 bulan kami melaksanakan kegiatan dan kami tidak digaji. Mudah-mudahan pendamping program infrastruktur berbasis masyarakat tentu kita harus manusiakan juga bisa tertampung untuk bisa digaji selama 5 bulan. Barangkali itu, Pak Menteri terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak. Bu Lasmi silakan, Bu Lasmi.

F-P. DEMOKRAT (LASMI INDARYANI, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya langsung saja seperti teman-teman yang lain saya juga mau mengucapkan terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri. Untuk Dapil kami Banjarnegara dan Purbalingga, sudah ada pekerjaan revitalisasi Banjarnegara dan juga pembangunan penyediaan air baku Kaliori Kecamatan Sigaluh. Mungkin saya apa namanya, menyampaikan lagi bahwa untuk pembangunan di air baku di Kaliori dahulu hanya ada penyalangannya ada 144 liter perdetik, sedangkan kebutuhannya 400 liter perdetik, Pak. Jadi, dengan adanya apa air baku di Kaliori kemarin, meningkat 100 liter perdetik, jadi masih ada kebutuhan sekitar 150 liter perdetik, Pak. Jadi, kalau masih bisa mohon di tambahkan lagi ditingkatkan lagi. Dan, juga ada usulan dari Dapil kami untuk irigasi Singomerto, kalau bisa untuk direvitalisasi atau ditingkatkan begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu. Kemudian Bu Estu silakan, Bu Estu.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua,

Saya tidak bertanya, tapi saya hanya ingin memberikan masukan saja Pak Menteri, terkait dengan pembangunan jembatan gantung yang selama ini sudah dibangun banyak sekali. Beberapa, bukan beberapa hari ya baru kemarin saya pulang kampung ke Dapil, ada masukan yang cukup bagus. Bagaimana kalau Kementerian PUPR sekaligus membuat desain untuk area yang ada di kanan kiri dari jembatan gantung, di desain untuk menjadi atau nanti itu menjadi wisata di desanya atautah nanti dikasih kalau memang tanahnya luas mungkin masih bisa dibuat semacam kios-kios. Desainnya saja dari Kementerian, sementara kan ada dana desa yang bisa digunakan. Sehingga, Pemerintah Desa ini juga untuk perencanaan dalam peningkatan apa, meningkatkan perekonomian masyarakat ini bisa apa terarah juga.

Mohon maaf, selama ini boleh dikata dana desa itu banyak besar, akan tetapi penggunaannya mungkin yang kurang tepat sehingga tidak terlihat. Semua menggunakan anggaran untuk wisata desa tetapi apa yang ada di depan mata, ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka dari itu saya kira usulan dari masyarakat yang seperti ini saya kira sangat bagus. Dan, juga apa yang tadi dikatakan oleh Pak Aidil tadi saya sepakat berkaitan dengan gaji untuk pendamping, mungkin yang saat ini hanya 4 bulan bisa ditambahkan itu saya kira saya juga mendukung karena memang begitu adanya ya. Dan, juga mohon izin Pak Menteri, seringkali pendamping ini tidak selaras atau sejalan dengan kita yang Anggota DPR RI yang ikut mengusulkan program-program kita ke Dapil, dengan bahasa ini uangnya negara, ini programnya pemerintah bukan partai. Ini saya kira juga kurang tepat, apalagi kalau di daerahnya ada Anggota Komisi V. Saya kira itu saja, Pak Menteri usulannya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Bu Estu. Pak Ishak Mekki, terakhir ya Pak Ishak Mekki sekarang, ya.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya langsung saja ke Pak Menteri. Pertama, saya mengapresiasi yang mana pelaksanaan G20 sudah selesai dan sukses dan andil dari Pak Menteri cukup besar. Taman Mini sudah dilaksanakan dengan baik dan rehab secara besar-besaran menelan biaya 1 triliun lebih, 1 triliun lebih. Dan, G20 bukannya datang begitu mendadak namun sebelum-sebelumnya sudah diberitahu Republik Indonesia ya akan menjadi tuan rumah G20, salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah. *Nah*, hasil kita sudah menyaksikan luar biasa bagus ya, berhasil tapi ada menurut saya karena ini tidak spesifik dan ini juga tidak dadakan *kok* anggaran sebesar ini ditunjuk-tunjuk langsung pelaksanaannya, jadi sehingga tidak ada sisa tender. *Nah*, kalau ini di tenderkan mungkin bisa merehab anjungan-anjungan yang rusak mengganggu pemandangan yang ada di lokasi tersebut. Karena banyak anjungan-anjungan dari daerah juga tidak tertangani karena tidak ada dana. Jadi, harapan kita itu semestinya sudah dimasukkan juga di dalam perencanaan perbaikan menghadapi G20 tadi.

Kedua, masalah *food estate*, tadi disampaikan bahwa ada lokasinya banyak tadi, salah satunya di Papua yang areal APL dan itu tentunya tanah negara, tanah Pemerintah Daerah. *Nah*, apakah ini pelaksanaan penanaman ke depannya pihak swasta melibatkan plasma atau diserahkan langsung kepada masyarakat setempat. Karena ya, kalau plasma kita melihat kejadian-kejadian sawit ini banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi, *nah* ini untuk diantisipasi.

Ketiga, saya mendapatkan informasi bahwa 2023, Tol Betung Batas Jambi itu menelan biaya 3 triliun. Menurut informasi yang layak dipercaya itu memakai dana APBN ke depan. Apakah tidak ada skala prioritas atau cara lain kerja sama KPBU ataupun pihak investor. Karena masih banyak jalan-jalan negara, jalan-jalan nasional yang perlu dilebarkan, termasuk juga ya, perlintasan sebidang di Sumatera tentu lebih dari 10. *Nah*, itu sering memakan korban dan juga perlu segera diperbaiki dibuatkan *flyover*-nya. *Nah*, jadi kalau itu ada skema KPBU, lebih baik skema KPBU daripada memakai dana APBN dan APBN gunakan untuk pelebaran jalan yang sudah mendesak seperti di Jakabaring dan juga lintasan sebidang lebih dari 10 di Sumatera Selatan.

Keempat, tol Palembang Kaya Agung. *Nah*, tol Palembang Kaya Agung ini dulu janji Bapak lebaran Tahun 2022 kemarin selesai, dan mulus. Dan, memang dari kalau kemarin dari Mesuji Lampung ke Kaya Agung itu jelek, sekarang sudah baik, tapi sekarang dari Kaya Agung Oki ke Palembangnya itu

masih banyak sekali yang perlu diperbaiki dan rusak ini rusak, perbaikan rusak, perbaikan rusak dan terus-menerus seperti itu. *Nah*, tolong bagaimana solusinya supaya ini menjadi perhatian karena sudah 2 tahun ini, perbaikan-perbaikan dan perbaikan dan sekarang untuk menghadapi tahun baru dan lebaran lagi, itu Pak Menteri.

Dan, terakhir usul saya Pak Menteri. Saya jarang sekali mengusulkan yang banyak-banyak itu Pak Menteri, karena sesuai dengan saran Pak Menteri, fokus-fokus saja yang mana tapi pasti. Tapi, ini juga belum terealisasi sudah 3 tahun Pak Menteri, untuk normalisasi Danau Teloko. Saya sudah bolak-balik ke Balai, ada hilang, ada hilang, *nah*, saya minta tolong di 2023 ini kalau bisa betul-betul menjadi impian masyarakat dan perjuangan saya itu bisa terwujud. Itu saja mungkin, Pak menteri.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Mohon maaf Pak, danau apa tadi Pak?

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M.):

Apa?

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Danau apa?

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M.):

Teloko danau Teloko di Kabupaten OKI Sumatera Selatan. Terima kasih, Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ishak. Tadi terakhir Pak Ishak Mekki ternyata, Pak Menteri, Bu Novi mau yang terakhir, silakan Bu Novi.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Terima kasih, terima kasih, Pimpinan. Saya memang minta yang terakhir karena *nggak* mau ada orang lain lagi, kalau kalau pertama nanti bisa sakit, yang terakhir *aja*. Tadi, Pak Menteri *nggak* mau lihat tapi ditarik-tarik ya Pak Menteri, ya.

Pak Menteri, selamat atas apa banyaknya penghargaan terakhir saya lihat di Metro TV kalau *nggak* salah jadi *person of the year gitu*, tidak hanya Bapak Pembangunan tapi *person of the year*, selamat tepuk tangan *dong* untuk Pak Menteri ini. *Aduh* luar biasa kita udah tepuk tangan udah tujuh kali Pak Menteri, jadi aspirasinya jangan sampai kurang, iya, *to the point aja gitu*. Karena 2023 tahun politik, jadi kemarin kita ucapkan terima kasih sekali atas program yang sudah turun. Banyak dari Bina Marga, dari SDA, Cipta Karya,

kemudian perumahan, luar biasa, terima kasih dan 2023 semoga makin banyak lagi. Amin ini di *aminin* semuanya Pak Menteri, terima kasih.

Kemudian, Pak Menteri, tadi penyerapan karena sekarang pembahasan penyerapan. Saya lihat tadi 69 dan 75 untuk fisik semoga *sih* bisa mencapai target dan ada prediksi ada sisa anggaran lebih sekitar 4,8 triliun di sini kalau saya lihat. Kalau bisa *sih* kita padat karyanya bisa disisihkan lagi untuk ada tambahan, karena SDA ada 1,3, kemudian Bina Marga dan 2,6, ini melihat dari perhitungan, berharap bisa disisihkan untuk kita itu Pak Menteri iya. Cocok apa *nggak*? Iya. Mewakili semuanya termasuk ini ada Komisi VI BKO ke sini.

Kemudian Pak Menteri dan jajaran terima kasih mau program di tempat saya banyak realisasi walaupun pasti kita ingin *nambah* terus, karena kadang-kadang sudah puas *pingin* puas lagi untuk tambah program. Ada jalan di Cilacap Pak Menteri, ada yang tahunan, usulan saya ini sebenarnya tentang penyerapan tapi karena jarang ketemu jadi pas ketemu ingin meluapkan semuanya. Jadi, Pak Menteri usulan saya yang tahunan itu di Wanareja di Jambu, karena undang-undang jalannya sudah kemarin kita sahkan tinggal menunggu PP mungkin ya, Pak Menteri. Berharap yang usulan di Wanareja karena sudah 2 periode di sana belum terealisasi, kemudian Wanareja Jambu di Cilacap. Kemudian yang parah lagi itu Adipala Cilacap menuju Kebumen, Pak, itu parah sekali. Karena kalau dari Jogja itu ke Cilacap potongnya lewat Kebumen Adipala menuju Cilacap, Pak Hedi mungkin pasti hafal itu berharap ini bisa dibantu dan juga Buntu menuju Kebumen. Itu Pak yang Bina Marga dan nanti komunikasi karena terima kasih juga jajaran di bawah sudah sangat baik berkoordinasinya. Usulan-usulan baik Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, kemudian perumahan, itu sudah sangat terjalin dengan baik. Apalagi sekarang kalau rapat pasti ikut menonton *gitu*, *deg-degan* juga kalau di komplain. Tapi *alhamdulillah* di Dapil saya sudah baik, hanya paling perlu sinergitas untuk pada saat mungkin peresmian atau apa namanya seremonial-seremonial karena kita ini diakui rakyatnya kalau rakyatnya tahu itu anggaran dan program dari kita.

Kemudian, sumber daya air juga sangat bagus banyak Embung yang diminta rakyat. Karena di Cilacap dan Banyumas banyak kekeringan, *stunting* juga banyak di Banyumas-Cilacap jadi terima kasih programnya. Dan, tetapi yaitu karena kalau kering kekeringan kalau hujan banjir dan longsor, apalagi di Cilacap dan Banyumas juga banyak bencana. Seperti tadi yang disampaikan yang besar-besar mungkin diliput oleh televisi tetapi yang di daerah kita kecil-kecil itu juga banyak walaupun tidak diliput oleh televisi.

Sehingga, dalam penanganan bencana ini sangat sekali kita juga walaupun prioritas seperti Cianjur, saya lihat Pak Menteri sudah sangat sigap. Saya lihat bagus sekali *alhamdulillah* kita ikut berterima kasih karena penanganan bencana itu sangat penting banyak yang sudah turun. Saya lihat kekurangan air bersih juga penting di Cianjur, kemudian MCK banyak sekali telepon dari masyarakat sana ke saya juga, karena teman-teman banyak. MCK, Pak Menteri sudah kirim mungkin bisa kalau ada, apa namanya barang lagi bisa dikirim ke sana untuk MCK. Karena 1 MCK untuk menangani banyak orang itu sangat membutuhkan dan air bersih dan tidak hanya di tempat-tempat

yang bencananya besar tetapi ditempat saya juga di Cilacap, banjirnya di mana-mana. Seperti di Jalur Wanareja yang saya waktu itu sampaikan bisa merendam 5 desa dan ratusan hektar sawah. Tidak hanya di Wanareja tetapi juga di jalur Sungai Ciraja, Pak Jarot sekalian di sana ada Citandui dan Serayu Opak tapi saya di Citandui, di Ciraja, ini Komisi VI ikut *ngomong* terus, di Ciraja jalur, memecah konsentrasi.

Kemudian, Wanareja dan bahkan di Cilacap terima kasih katanya tahun depan ada abrasi di Cilacap itu ada program, Pak, dan pokoknya terima kasih tetapi memang masih banyak yang perlu dibenahi. Pastinya, Pak Jarot harus ada formulasi, karena ada sedimentasi juga yang perlu ditangani. Di Cilacap itu kayak banyak sekali yang pendangkalan-pendangkalan, kalau dikeruk normalisasi pasti *nggak* ada selesainya, harus ada apa rumusan khusus untuk menangani banjir dan pendangkalan ini, Pak. Terima kasih tapi saya akan koordinasi lebih lanjut dengan jajaran di bawah dan Pak Jarot.

Cipta Karya juga terima kasih kemarin usulan di Sekolah Taruna Nusantara sudah bisa direalisasikan walaupun, apa masih berjalan ya Bu ya, terima kasih dan perumahan ya, walaupun bukan Dapil saya tetapi kita DPR itu nasional *gitu* ya. Sehingga, banyak sekali teman-teman yang mengusulkan, jadi kalau kita membantu sana pasti Dapilnya harus berterima kasih. Karena teman-teman se-Indonesia Pak Menteri. Kita fokus di Dapil, iya tetapi, pasti banyak teman-teman yang di Indonesia tempat lain itu mengusulkan, karena tempat lain belum tentu ada Anggota Komisi V nya. Jadi, minta maaf kalau ada yang terganggu, semoga tidak terganggu.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Senang sekali.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Nggih Pakde matur nuwun alhamdulillah.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Apalagi yang bicara orang cantik habis ulang tahun.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Iya terima kasih.

Kemudian, *food estate* dan IKN Pak, karena terapan ini kita juga berharap *food estate* bisa membantu dan bisa berjalan dengan lancar dan IKN bisa sesuai dengan apa namanya *timeline*-nya. Karena Pak Presiden menyampaikan 2024 kalau *nggak* salah sudah ada gedung-gedung yang berdiri, tetapi apakah itu bisa tercapai itu, tergantung Pak Menteri, makanya nanti saya ingin menanyakan. Dan, BMKG menyampaikan di Kaltim itu ada ditemukan 17 titik panas *gitu*, jadi ini harus disesuaikan dengan pembangunan harus lebih cepat dari apa yang ditargetkan.

Itu kira-kira, Pimpinan, nanti lebih lanjut kita bisa berkoordinasi. Tadi, yang paling penting adalah peningkatan sinergitas pada saat program tersebut turun. Apa itu peletakan batu pertama, seremonial dan peresmian, serta bisa mengajak pengusaha-pengusaha lokal yang ada di daerah, Pak Menteri. Karena pemenangnya banyak dari luar sedangkan banyak pengusaha lokal yang ingin ikut mengerjakan dan bisa berkoordinasi, itu Pimpinan, terima kasih, Pak Menteri dan jajaran.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Pak Menteri, Bu Novi hari ini saya lihat lantang kalau dia *ngomong* saya lihat dan lantang kemudian panjang-panjang dia suka bicara hari ini, Pak Menteri.

Pak Iqbal sekarang meja, Pimpinan, Pak Iqbal silakan, Pak Iqbal.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Mas intrupsi, mohon maaf Pak, bisa izin sebentar, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh silakan Pak. silakan Pak.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Makasih.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Bukan karena saya pastinya, karena dari tadi di sini kan dingin.

KETUA RAPAT:

Kita tunggu Pak Menteri. ya, *ndak* usah kita skors kita tunggu aja iya.

Pak, sebentar lagi, silakan, silakan, silakan, Pak. Bagi ada yang mau menyerahkan silakan Pak, sama Pak Dirjen atau Pak Sekjen, silakan. Foto-foto

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Tadi Pak Menteri, sudah catat, Pak Mekki.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, itu Pak Ishak Mekki itu Pak, lagi berbahagia Pak. Saya curiga Mbak Novi lagi mencegat di luar, lagi jadi ini Pak Menteri, jadi lama jadinya ini. *Oh* silakan, Pak, silakan kalau udah menyerahkan, silakan Pak. Foto-foto, ini Pak Andre ditugaskan hanya sehari Pak, hanya kehadiran hari ini aja setelah itu kembali ke, sambil minum Pak, sambil diminum sambil diminum.

Makasih, Pak Menteri. Sudah boleh Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal.

F-PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pak Menteri,
Pak Sekjen beserta seluruh jajaran dari PUPR,**

Pertama-tama salam kenal Pak Menteri, saya Muhammad Iqbal saya baru 3 bulan di sini. Saya dari Dapil Sumatra Barat Sumber 2, temannya Pak Ade Rosade dan Ibu Athari. Kalau Pak Ade betah di sini berarti kita 3 orang Pak, nanti dari Sumatra Barat, mudah-mudahan betah beliau *nih* biar pindah dari Komisi VI, ke Komisi V.

Pak Menteri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama, mengenai APBN. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian PUPR ini adalah salah satu Kementerian yang mempunyai anggaran yang cukup besar dan tupoksinya tentu berkaitan dengan infrastruktur. Oleh karena itu, boleh saya katakan bahwa Kementerian PUPR ini merupakan jantungnya program pembangunan di Indonesia. Maka dari itu, tidak kita salahkan teman-teman dan saya juga *mengamini* mendukung bahwa memang melihat kinerja Pak Menteri itu tentu patut kita apresiasi. Mudah-mudahan kerja Pak Menteri semakin baik ke depannya.

Terkait dengan serapan anggaran, di sini kalau serapan anggaran keuangan tahun 2022 ini baru sebesar 69,41% Pak Menteri, kemudian adaptasi fisiknya itu baru sebesar 75%. Artinya dengan bulan yang hampir habis tahun ini, tentu harus ada terobosan-terobosan dari Kementerian PUPR agar realisasi anggaran ini seperti maksimal yang kita harapkan. Walaupun kini sudah ada Pak, langkah-langkah penghasilan anggaran, di sini saya lihat ada tiga poin.

1. Itu dialokasikan untuk bencana, kemudian untuk pemasaran infrastruktur dan kemudian mempercepat pembangunan, itu dari anggaran, Pak.
2. Mengenai program, saya sangat mengapresiasi sekali dengan program-program Padat Karya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Karena yang namanya program Padat Karya itu tentu memberdayakan masyarakat setempat, itu tentu yang kita harapkan, Pak.
3. Ini mengenai penanganan bencana, tentu kita dukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Yang kalau kita melihat di media, baik itu media televisi dan media massa, cepat sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian PUPR tetapi tentu setelah pasca bencana itu, itu yang kita tunggu tunggu Pak yaitu membangun

kembali. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ade tadi, di Sumatera Barat itu di daerah Pasaman Barat dan Pasaman Timur, saya kira masyarakat di sana masih membutuhkan, di dalam pembangunan perumahan di sana, Pak.

4. Ini tentang Dapil Pak, tentang Dapil. Memang Komisi V ini banyak yang tahu bermitra dengan Kementerian PUPR, Pak. Saya semenjak duduk di Komisi V baru 3 bulan ini, banyak sekali Pak Menteri proposal, proposal dari Kepala Daerah, Pak, Kepala Daerah Sumatera Barat. Mungkin, Pak Ade juga di Komisi VI banyak juga. Baik itu proposal dari Pemerintah Daerah Sumatera Barat maupun proposal dari kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia. karena ruang lingkup kita tugasnya adalah nasional tentu ini tidak bisa kita tolak dan mungkin saya harapkan di lain waktu saya bisa memberikan proposal-proposal yang dititipkan kepada saya oleh Kepala Daerah tadi agar bisa ditindaklanjuti.

Saya kira itu saja, Pak Ketua, yang bisa saya sampaikan.

Wabillahittauhiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Makasih, Pak Iqbal. Pak Roberth Rouw silakan, Pak.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pimpinan.

Saya langsung Pak, Saudara Menteri dan jajaran. Yang pertama, saya masuk ke Pagu Anggaran, walaupun tadi Pak Hamka sudah menyampaikan dan Pak Mekki. Ini kalau yang terakhir kita *nih* susah *nih* karena hampir sudah diambil semua ya, tapi kami coba untuk menambahkan ada beberapa hal yang menjadi *consent* saya. Terutama tentang Anggaran 2022 sesuai dengan hasil pembahasan anggaran kami di sini, yaitu 100,59 triliun terus menjadi 121,40 triliun ada penambahan sebesar 20,81 triliun, jadi berdasarkan fakta. Saya sependapat mengapresiasi bahwa Pemerintah *consent* di dalam penambahan biaya untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi, ada beberapa pertanyaan saya yang ingin saya sampaikan melihat bahwa dari 20,81 triliun ini ada rupiah murni sebesar 11,38 triliun, yaitu untuk mendukung kegiatan KTT G20, ASEAN Summit, MotoGP, dan penanganan dampak bencana ya.

Terus terang, yang ingin saya memberikan beberapa pandangan untuk kita. Mungkin kalau dibuat 11,38 triliun ini, dari taruhlah utang luar negeri atau dari mana, mungkin akan jadi pertanyaan orang. Karena tidak mungkin pembiayaan taruhlah MotoGP dengan memakai utang negara pasti menjadi pertanyaan besar dari masyarakat ya kan, maka ini menjadi rupiah murni. Kami dapat menerima itu, karena memang ada dasar hukum Pemerintah di dalam menghadapi Covid 19. Kami memberikan ruang kepada Pemerintah untuk bisa dapat membuat program-program untuk mengantisipasi dampak daripada

Covid 19, ingat bahwa dampak Covid-19 bukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini yang buat saya, coba memperingatkan kita semua dan Pak Menteri dan jajaran, Komisi V adalah Mitra yang harus juga, memang ruang itu kita sudah berikan, tapi kan alangkah baiknya agar mungkin penambahan anggaran ini sebelum digunakan juga disampaikan ke kami agar kami juga tahu. *Oh* ya, ada Kementerian mitra kami ada mendapat penambahan anggaran sekian, sekian, sekian, yang diperuntukkan untuk apa saja ya kan. Bukan setelah digunakan akhir anggaran baru kami diberi tahu, ini yang mungkin, ya, perlu menjadi catatan untuk Pak Menteri dan jajaran, menurut kami.

Yang berikut, kami juga melihat bahwa di dalam penganggaran ini, bahwa Pemerintah juga *consent* untuk memberikan anggaran untuk bencana. Saya inginkan, bahwa, anggaran bencana ini yang harus diperbesar. Karena kami lihat masih banyak dampak bencana yang belum selesai penanganannya, Pak Menteri. Pemerintah hadir di awal tetapi sebentar, begitu sudah reda, ini di tinggalkan, ya kan, masih banyak dampak bencana yang belum selesai di tangani. Maka, menurut kami, mohon kepada Pak Menteri dan jajaran, agar dampak bencana ini kalau bisa dapat diselesaikan, ya. Di daerah Sulawesi Tengah, ya, Palu, itu belum selesai juga, ya kan, di Sumatera Utara, di mana-mana, kan ini yang perlu menurut saya menjadi catatan saya ya kan.

Karena dampak bencana itu, ada rakyat yang sengsara di sana, rakyat yang sengsara, ini yang perlu anggaran ini harus bagaimana membuat rakyat itu sejahtera, ya kan. Kita bangun IKN semewah apa pun tapi kalau masih ada rakyat yang terdampak bencana masih sengsara, maka negara belum adil di dalam memberikan manfaat daripada penganggaran kepada masyarakat. Ini sekali lagi, saya mohon menjadi catatan penting di dalam pembiayaan ke depan Pak Menteri.

Kita lihat juga, tadi sempat di sampaikan oleh Pak Mekki ini juga menjadi konsen, saya ingin supaya Pemerintah tidak berbisnis dalam Pemerintah. Jangan *ujug-ujug* karena ada payung hukum ya Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional, ya G20 Asean Summit di beberapa Provinsi, DKI, Bali, NTB, NTT.

Yang namanya Taman Mini, mungkin itu sudah lama harusnya disiapkan dari jauh-jauh hari, jangan di pakai ini menjadi nomenklatur ini untuk bisa mempergunakan itu, ya, mohon maaf saya harus sampaikan ini tanda kutip, ya kan negara berbisnis dengan negara. Karena itu semua yang mengerjakan itu adalah BUMN dengan penunjukan langsung, ya, dengan penunjukan langsung. Karena ini dalam rangka menghadapi G20, maka ini harus cepat tidak perlu tender ini di tunjuk, ya. Kita tahu semua walaupun itu mau di lakukan mungkin silakan saja, BUMN boleh kerja tapi dibuka *space*-nya, *tender* terbuka dulu, berapa nilai yang disebut, kalau BUMN sanggup silakan kerja, itu *fair*, jadi negara tidak berbisnis dengan negara. Kalau ini semua yang desain yang perencanaan semua, ya kan, BUMN itu adalah negara, ya kan, agar ini mohon maaf saya harus sampaikan ini, ya kan. Karena kita tahu satu koma sekian T, kalau kita lepas itu mungkin dibawa satu miliar atau triliun, ya kan. Kita tahu semua bagaimana sekarang tender yang dilakukan, ya kan, bisa dipangkas

sampai minimal 25 sampai 28 persen, berani penawaran, dan itu menjadi masalah, proyek-proyek itu menjadi masalah. Tetapi, kalau diberikan kepada BUMN tidak ada seperti itu. Dan, mohon ini ruang-ruang ini yang harus kita sebagai Anggota Dewan mohon maaf kami harus kontrol itu dan kami harus sampaikan bahwa jangan dipergunakan hal-hal ini. Mungkin Pak Menteri, tidak ini, tapi kita tahu semua ya kan, peluang ini ada niat baik, Bapak Presiden dengan buat ini ya kan untuk payung hukumnya tetapi ini jangan disalahgunakan. Mohon sekali lagi, saya mohon ini, ini sebagai fungsi kontrol kami, kami harus sampaikan itu.

Yang berikut, saya kira ini tadi Pak Menteri juga sudah sampaikan tentang bagaimana IKN ke depan. Ada pembangunan tadi saya lihat rumah susun ya, Pak Menteri, rumah untuk pekerja konstruksi, pekerja konstruksi *ah* itu. Kita tahu semua yang kerja di sana adalah BUMN ya kan, harusnya kontraktor siapkan perumahan untuk barak untuk karyawannya konstruksi. Kalau Pemerintah semua, siapkan itu bagaimana, ini yang menjadi catatan ya kan. Begitupun, tadi saya juga lihat bagaimana kalau kita hibahkan untuk *food estate* dan sebagainya alat berat di daerah ya kan. Kita mungkin mungkin Pak Menteri mungkin niat hibahkan ke sana, tapi Pimpinan Daerah nanti dikelolanya apakah benar, nanti dirental lagi di sana. Ini masalah yang juga harus dikontrol dengan baik ya kan. Karena ada pengusaha-pengusaha dari luar yang tidak punya alat tidak invest di sana, menang tender ya dengan gampang nanti tinggal alatnya sudah ada di daerah itu pergunakan itu ya kan *ah* ini. Ini catatan yang perlu menjadi *consent* kita kepada, Pak Menteri, saya tahu kinerja Pak Menteri sangat baik. Jadi, ini juga untuk menjadi perhatian kami ingin sampaikan masukan ini, Pak Menteri.

Yang berikut Pak Menteri, ini dari daerah Dapil saya. Pak Menteri yang namanya Bapak Jokowi itu tidak pernah ada Presiden di Republik ini selama ini yang berani sampai di Wamena. Bapak Jokowi yang sampai bukan cuma di Wamena, juga kabupaten yang cukup kontroversial di dalamnya. Saya kira kalau Presiden sudah sampai di sana, harusnya Kabupaten ini perubahannya pasti lebih baik dari yang lain, tetapi kemarin Kepala Dinas PU, Sekda, dan jajaran ke tempat saya dan mereka sampaikan bagaimana prihatinnya melihat daerah itu Pak Menteri. Air bersih belum ada sama sekali catatan, Bu, air bersih tidak ada, air sudah dekat air makin jauh di sana, Pak Menteri, ini catatan, Pak Menteri. Terus jalan yang memang menjadi konsen waktu itu karena Pak Presiden datang jalan itu dibangun dengan begitu semangat sampai turunkan juga dari TNI (*suara kurang jelas*) untuk membangun itu.

Tapi, sekarang jalan itu sudah hampir tidak dapat dilewati karena banyak sudah jatuh, karena jalan itu dibuat telusuri sungai ya, di pinggir sungai dan itu sangat dekat. Dan, mereka lapor kemarin Pak, Bapak boleh datang lihat itu sudah jatuh semua jalan-jalan itu, ya, banyak sekali yang sudah tidak dapat digunakan. Jadi, ini menjadi catatan Pak Menteri mungkin ya kan. Karena saya tanya kenapa bisa begitu, ya karena gampang saja Pak pakai apa sedotan pasir dari itu tinggal naik sedot tutup badan jalan maka badan jalan itu sangat dekat dengan aliran sungai, maka sebentar saja sudah jatuh semua, ini catatan yang perlu saya sampaikan Pak Menteri.

Harapan saya juga Pak Menteri, dana bencana ini, yang tadi di dalam Pak Menteri sampaikan saya sudah sampaikan dan Silva ini bisa digunakan untuk bencana. Di tempat kami, bencana kemanusiaan itu bukan cuman gempa bumi di Papua, ada yang namanya kerusakan di sana, dampak politik, itu membuat masyarakat rumahnya habis terbakar, ya, masyarakat mengungsi sampai sekarang masih banyak sekali di Kabupaten beberapa Kabupaten ya dampak dari pada kerusakan, mohon Pak Menteri ini menjadi catatan. Dan, kemarin juga mereka sampaikan tolong Pak Menteri dan jajaran, dari Kementerian kalau turun berkoordinasilah dengan mereka di daerah. Karena banyak yang tidak berkoordinasi kelapangan, akhirnya kena dampak di lapangan. Mereka jamin kalau mau lakukan pembangunan di daerah kami koordinasi sama kami, kami jamin kami *pingin* pembangunan itu ada di daerah kami. Kami jamin kami akan berkomunikasi dengan saudara-saudara kami yang berseberangan untuk pembangunan itu, ya. Ini yang mereka ingin, saya sampaikan kepada Pak Menteri agar saya minta teman-teman yang ingin pembangunan di daerah sana daerah-daerah yang konflik tolong berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah dan jajaran. Agar biarkan mereka nanti berkomunikasi dengan, karena masyarakat sangat membutuhkan pembangunan itu, biarkan masyarakat sama masyarakat yang nanti berkomunikasi untuk pembangunan itu hadir di sana. Tetapi, libatkanlah masyarakat daerah untuk sama-sama membangun jangan semua diambil dari luar.

Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, Pimpinan, mohon maaf Pak Menteri, mungkin agak panjang dan kurang enak. Saya mohon maaf karena ini harus saya sampaikan jujur ke Pak Menteri dan jajaran. Saya lebih enak panggil Saudara Menteri Pak, lebih enak kita bersaudara daripada Bapak dan anak, Saudara Menteri. Terima kasih, saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Roberth. Pak Andi Iwan Aras, silakan, Pak.

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pimpinan. Ini kangen banget rasanya Pak Menteri satu priode *nggak* ketemu.

Yang saya hormati, Pak Menteri PUPR beserta para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 yang hadir pada hari ini.

Saya, pertama-tama memberikan apresiasi atas kinerja dari Kementerian PUPR dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan ataupun pembangunan infrastruktur yang ada pada saat, apa, khususnya di Tahun Anggaran 2022. Saya ingin lebih melihat dari sisi rencana fisik Tahun Anggaran 2022 per-saat ini sebesar 79,46%, kemudian realisasi fisiknya masih 75,04%, berarti masih deviasi negatif, Pak Menteri. Dan, kemudian sisa tahun anggaran ini kurang lebih tinggal satu setengah bulan lagi, yang mana kemudian kalau kita melihat dari prognosis penyerapan yang

sebesar 96,04%, itu berarti masih dibutuhkan kurang lebih 21% lagi untuk dicapai, yang mana *equivalent* dengan nilai rupiahnya mungkin kurang lebih sekitar 25 triliun.

Itu kalau dari total anggaran yang Kementerian PUPR kelola, mungkin kurang lebih 30 triliun yang masih belum terserap sampai dengan saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Menteri beserta jajarannya tentu akan maksimal dan bisa mencapai target-target yang Bapak tetapkan pada saat ini. Khusus untuk di bidang Bina Marga, mungkin Pak Dirjen Bina Marga memang saya melihat secara detail, salah satu Dirjen yang kemudian penyerapannya agak lebih rendah kurang lebih baru 68,65%. Padahal, kalau kita melihat salah satu Pagu, apa namanya pengalokasian anggaran yang cukup tinggi di Kementerian PUPR itu ada di Dirjen Bina Marga sebesar 45,9 triliun. Yang kurang lebih 37,86% dari total anggaran yang ada di kementerian PUPR, sehingga tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran secara kolektif secara kumulatif di Kementerian PUPR.

Saya juga ingin menyampaikan ke Pak Menteri, menyangkut masalah kira-kira apa *sih* yang menjadi penyebab kemudian ada selisih daripada penyerapan ini atau kekurangan penyerapan. Mungkin saya melihat ada beberapa hal Pak Menteri, permasalahan-permasalahan menyangkut masalah-masalah sosial, khususnya pembebasan-pembebasan lahan semoga sudah terselesaikan. Ada beberapa kegiatan yang kemarin kami kunjungi seperti pembangunan *fly over* Kopo dan Buah Batu yang kemudian telah dianggarkan sebelumnya lantas kemudian karena persoalan lahannya tidak selesai, sehingga kemudian di, tidak dilaksanakan. Saya berharap hal-hal yang seperti itu kemudian nanti ke depannya mudah-mudahan penganggaran itu bisa dilaksanakan setelah persoalan-persoalan sosial ini masalah-masalah sosial ini sudah terselesaikan, sehingga kemudian tidak menjadi salah satu penyebab atau lambatnya proses penyerapan anggaran yang ada di Kementerian PUPR.

Kemudian, Pak, saya juga sangat sepakat dengan Pak Menteri dengan kondisi saat ini. Negara kita ini sangat banyak di tempa bencana, di terpa bencana sehingga kemudian pengalokasian Silva yang 4,81 T, ini mungkin lebih saya cenderung lebih setuju untuk lebih diprioritaskan ke bencana alam. Karena kondisinya, saya kira anggaran ini tidak akan mampu mencukupi apabila kita ingin menangani hal itu semua, khususnya yang sedikit banyaknya ini agak sering terjadi di lapangan, Pak Menteri, khususnya untuk bencana gempa bumi. Ini yang kadang-kadang kita kalau ketemu *ama* masyarakatnya mereka butuh bantuan konkrit seperti apa kira-kira yang kita bisa berikan. *Nah*, kalau selama ini kan kita cuman mengenal BSPS dari Kementerian PUPR, saya kira itu juga tidak cocok untuk diarahkan ke situ.

Mungkin Pak Menteri, bisa ada menu khusus untuk bantuan apa namanya rumah-rumah masyarakat kita yang terkena bencana gempa bumi, Pak. Karena kalau kami *nggak* salah di Kementerian Sosial ada anggaran sebesar 50 juta per-rumah, saya pikir di Kementerian Bapak lebih optimal dibandingkan daripada Kementerian Sosial, mungkin lebih teknisnya lebih PUPR bisa lebih menguasai. Apakah kemudian kita bisa membuat atau

mengalokasikan kegiatan yang seperti itu juga untuk penanganan bencana khususnya bencana gempa bumi ke depannya? Ataukah kita mengambil alih Pak, anggaran yang dikelola oleh Kementerian Sosial itu untuk pembangunan pengganti rumah-rumah bagi masyarakat kita yang terkena dampak gempa.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, saya *nggak* usah panjang-panjang. Yang terakhir, Pak, menyangkut masalah turunan undang-undang jalan kami masih menunggu apakah sampai sejauh mana, kami mendengar bahwa masih tahap, Pak, Inpresnya masih belum selesai, kira-kira report-nya sudah seperti apa. Mungkin itu saja saya *nggak* berbicara Dapil karena agenda kita ini evaluasi pelaksanaan APBN, Tahun Anggaran 2022.

Terima kasih, Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Andi Iwan Aras.

Mungkin saya kalau bicara persoalan resapan-resapan anggaran, IKN, *food estate*, kemudian Taman Mini Indonesia, saya kira sudah jelas semua dari penjelasan awal dari Pak Menteri tadi. Saya cuma sedikit mau bicara, mau pamit, mau pamit melalui Pak Menteri, pamit artinya minta izin. Kebetulan di daerah saya itu, Pak, ada baru-baru yang demolah *gitu*, Pak, luar biasa viral *tuh* Pak, demo di sana. Kemudian, akibat ada yang meninggal anak perawat meninggal, Pak, naik motor jatuh di kubangan jalan itu meninggal, meninggal, terus demo besar-besaran lagi di sana dan memblokir jalan. Izinkan saya Pak Menteri, kalau misalnya bisa saya ajak dari Balai untuk kita tinjau sama-sama tanggal satu ini, Pak, dari Balai jalan yang ada di daerah sana. Kita lihat perkembangannya, kalau ada Pak Dirjen, ya, kalau ada Pak Dirjen ini tanggal satu, Pak, tanggal satu pagi Desember ini. Kalau bisa...bisa berangkat hari rabu, hari rabu kita berangkat, sorenya, Pak Direktornya.

Terima kasih banyak Pak, hanya itu *aja* Pak Menteri.

Sekarang, sampailah pada tanggapan Pak Menteri. Cuma Pak Menteri karena kita bicara soal IKN dan yang lain-lain sebenarnya hari ini dan resapan anggaran, kemudian banyak yang bicara tentang persoalan Dapil, apa segala, mungkin Bapak jawab saja yang persoalan sesuai dengan pembicaraan kita hari ini agenda kita hari ini. Hal-hal yang khusus untuk Dapil itu mungkin bisa dijawab secara tertulis, Pak Menteri. Supaya kita lebih cepat karena sekarang waktu sudah hampir jam 5.

Saya persilakan, Pak Menteri.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Terima kasih.

**Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI yang terhormat, dan
Saya hormati Ibu-Bapak sekalian,**

Saya ingin menjawab dari tentang tambahan Pagu karena ini nanti menyangkut semuanya. Jadi, memang tambahan Pagu ini jadi 20,91 tambahannya, yang bisa kami laporkan dari luncuran SBSN sebesar 2,3 triliun ini untuk percepatan jalan terutama, apa untuk penanganan jalan. Jadi, supaya lebih cepat kita meluncurkan SBSN-nya. Kemudian, percepatan PHLN karena ini sudah terprogram irigasi, pengendalian banjir, mungkin Spam Regional ini untuk PLN. Kemudian, untuk yang rupiah murni 11,38 triliun terdiri dari tadi yang *event* internasional, KTT G20 dan yang lain-lain termasuk itu yang Taman Mini dan ASEAN Summit, di Labuan Bajo sebesar 2,67 triliun. Kenapa ini *kok* baru dilakukan ya, memang itu perintah Presiden baru, jadi belum ada perintah pada saat kita menyusun anggaran dulu. Kemudian, bencana untuk bencana 1,53 triliun ini membayar. Jadi, Bapak penanganan bencana itu, pada saat rehab setelah, pada saat bencana seperti sekarang di Cianjur, ini kita kerjakan dulu semua *pure financing* dari penyedia jasa, siapa pun yang ada di situ ada yang swasta juga kalau dia mau. Kemudian, nanti setelah selesai baru diaudit oleh BPKP, dari audit BPKB, baru kita berani membayar, sebelum ada audit BPKP tidak akan terbayar tidak...tidak akan kami bayar sebelum ada *approval* data diaudit dari BPKP. *Ah*, ini *utang-utang* bencana-bencana yang dulu ini yang terus dibayar. *Ah*, tadi kalau Pak Robert Rouw kalau dampak bencana alam jangan ditinggalkan, kami tidak meninggalkan. Sulawesi Tengah sampai sekarang Gumbasa jembatan, tetap kami bikin oke. Sulawesi Barat kantor Gubernur tetap kami yang bikin, dibangun. Kemudian di NTT, NTB dengan Seroja masih terus kita bangun, jadi tidak ada yang kami tinggalkan untuk yang bencana-bencana alam yang ada. Di sulut yang apa, yang apa Amurang itu kita relokasi, Pak, di Amurang itu tetap kita kerjakan jadi, tidak.

Kemudian, kalau tadi Pak Andre misalnya di Pasaman yang rusak berat belum diberi itu bukan dari PU.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Rusak berat *udah* Pak dari BNPB, tinggal rusak yang, izin, Pimpinan. Jadi, yang rusak berat sudah dibantu dari BNPB 50 juta yang aspirasi Pak Bupati Pasaman dan Pasaman Barat *tuh* yang rusak sedang, Pak.

Terima kasih, Pak.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Rusak sedang, rusak ringan yang 10 dan 25 juta itu tupoksinya BNPB. Kami kalau relokasi baru kami bangun atau kami mau mendampingi pada saat yang berat tadi di dibangun sendiri oleh mereka kita dampingi secara teknis, seperti saranya Pak Edi, tadi. Jadi, kalau penanganan bencana kami menjadi subsistemnya dari BNPB, *leading* agensinya BNPB. Tapi, kalau bantuan stimulan kepada rumah-rumah itu BNPB, Bapak, kayak Cianjur ini 10, 25, 50 itu BNPB tapi kalau nanti relokasi kami yang *ngerjakan*, bangun oleh PU. Kalau dia yang tadi berat mau direlokasi kami yang bangun, tapi kalau dia mau membangun sendiri di tanahnya diberi stimulan 50 oleh BNPB bukan kami, *gitu* Bapak itu SOP-nya untuk bencana alam.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Interupsi, Pimpinan, Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Silakan silakan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya Pak Menteri, dari yang soal itu kan bencana-bencana alam, yang bencana kerusakan yang tadi saya sampaikan masalah perumahan masyarakat, terutama di daerah pegunungan ada beberapa Kabupaten Kota mungkin itu perlu penanganan segera. Karena banyak juga masyarakat yang mengungsi di, dari Pegunungan Bintang apa Intan, Intan dan Nduga itu sampai sekarang belum terlaksana. Mohon itu menjadi catatan

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Makasih ya, Pak.

Kalau IKN di 2022 ini, kalau IKN pada saat pengalokasian 100,59 triliun, di sana ada (*suara kurang jelas*) belum termasuk anggaran IKN di situ ada. Nah, sehingga IKN ini dipegang oleh Ibu Menteri Keuangan. Pada saat kami diperintah mulai dengan pekerja astra (*suara kurang jelas*) undang-undangnya ada kami mengalokasikan, apa mengusulkan untuk anggaran IKN sebesar 47 triliun untuk anggaran prasarana dasar. Sedangkan, untuk 2022 ini karena hanya menyangkut uang muka, kami hanya butuh 5,09 triliun ini dialokasikan oleh beliau. Karena di dalam mengalokasikan 100 triliun dulu di dalam di catatan kakinya itu ada belum termasuk IKN dan bencana, bencana ya, oke jadi masih ada. Kemudian, (*suara kurang jelas*) untuk pembebasan lahan lahan untuk PSN ada tambahan 2,11 triliun, jadi ini untuk rupiah murni ini, Bapak.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,

Kemudian untuk MLFF, saya terima kasih masukannya, Pak Andre. Cuma kalau tadi dibilang ada penolakan dari Bank Indonesia, itu tidak benar. Bank Indonesia hanya memberikan arahan tidak boleh eksklusif untuk MLFF. Kita bekerjasama dengan apa-apa Korlantas, bahkan ada Tim Korlantas yang dikirim ke Hungaria untuk mempelajari sistem di sana itu ada sendiri, karena itu termasuk nanti namanya ETLE-nya. Jadi, untuk *Electronic Traffic Law Enforcement* juga harus dipelajari ini semua nanti domainnya Korlantas, jadi semua. Kemudian, ada penolakan dengan apa BUJT juga saya kira *nggak* betul hanya pada kekhawatiran tentang dana operasional awal penjaminan pembayaran. Ini akan disiapkan BUP ini nanti masuk di dalam materi RPP jalan tol yang sedang disiapkan.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Izin, Pimpinan, boleh Pimpinan, menanggapi Pak Menteri sebentar.

KETUA RAPAT:

Silakan.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Silakan.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Pak Menteri, izin Pak Menteri. Mungkin saran saya, Bapak undang saja seluruh apa BPJT itu baik swasta maupun BUMN, Bapak dengar dari hati ke hati aspirasi mereka seperti apa, iya terima kasih Pak Menteri dan (suara kurang jelas) libatkan BPKP dan BPK juga, Pak Menteri.

Terima kasih, Pak Menteri.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Kami juga ingin nanti mau sosialisasikan pada secara detail teknis terutama juga kepada Bapak-bapak Komisi V supaya jangan, termasuk sistem canvas-nya kita punya sistem canvas. *Nggak* ada yang kami sembunyikan di dalam MLFF ini seperti yang Pak Eddy Santana tadi ini kita harus maju. Ini bukan hanya pertama di dunia, kan kita ke mana-mana kalau lewat Tol kan *nggak* berhenti, *ting* lewat *ting* lewat, itu yang akan kita coba. Dulu waktu kita mau coba dengan apa *tuh* kartu, *wah* saya di demo, katanya ini menyalahi ini bukan alat pembayaran plastik ini, menurut, ya *nggak* setuju tapi akhirnya *nggak*, semua sekarang sudah pakai E-Money apa, E-Toll itu, Pak. Waktu pertama kali waktu itu mau di, waktu mau diluncurkan jam 12.00 malam, Kepala BPJT, Pak, ini ada peluncuran? *Wes*, tidak ada peluncuran-peluncuran pokoknya jalan aja. Kalau ada peluncuran nanti malah bangunin orang, jadi pasti ada yang begitu. Jadi, asal kita mungkin kurang sosialisasinya saya setuju Pak, nanti kami adakan sosialisasi.

Kemudian untuk...untuk surat edaran LKPP dari Pak tadi, ini juga Pak Suhartono. Ini karena baru dan kemarin sudah diadakan sosialisasi. Ini menjadi eskalasi ini semenjak mengapa tadi, Bina Marga agak seret apanya penyerapannya karena pada menunggu, Bina Marga ini yang paling terdampak karena BBM dan aspal. *Nah*, sekarang dengan adanya ini mereka udah jalan lagi Dipa sudah kita revisi semua, jadi mudah-mudahan akan lebih cepat. Mungkin prognosinya memang Bina Marga agak rendah berapa prognosinya? 93% yang lainnya 96. Ini Bina Marga prognosinya hanya 93%, ini hanya karena gara-gara eskalasi dan ini *alhamdulillah*.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Menteri saya intrupsi soal.

KETUA RAPAT:

Silakan silakan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Soal kenaikan BBM. Saya sepakat Pak Menteri, bahwa ada revisi soal kenaikan BBM. Karena kita tahu bahwa kontraktor sangat terbebani dengan kenaikan BBM, tetapi mohon juga ini dilihat terutama Pak Dirjen Bina Marga. Jangan nanti ada yang sudah kontrak sekian lama belum bangun apa-apa sekarang dia dipakai dengan anggaran yang baru, ya. Karena itu di daerah saya, saya ingin sampaikan Pak Menteri, saya *conceren* dari kontrak yang sudah ada ya, satu jembatan itu sudah putus kontrak sepakat, tapi 12 jalan belum. Talut itu, kemarin tender ulang karena yang pertama mundurkan diri ya, dari lima itu ya, satu selesai kerja empat bermasalah ya. Jembatan satu sudah putus kontrak, tetapi ada dua badan ruas jalan yang sampai sekarang belum ada aspal semeter pun kontak dari bulan Maret apa April, jangan ini masuk lagi.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Cocok.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya ini, Pak Menteri. Saya mohon supaya ini segera di evaluasi kembali dan harusnya sudah PK, Pak Menteri harusnya sudah PK itu sudah harus. Terima kasih, Pak Menteri.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Oke sepakat Pak, setuju Pak, setuju. Bahkan kami *tuh* mau *makai* sejak kapan dia harus, sejak kapan itu dieskalasi kan ada *itungannya*, Pak, yang sebelum ini ya jangan dieskalasi atau bahkan atau mungkin satu kontrak dieskalasi, ini lagi kita yang penting ada eskalasi. Cuman, ya makanya *nggih* cocok, Pak.

Yang selanjutnya Ibu-Bapak sekalian.

Saya terima kasih Pak Eddy Santana. yang telah mengklarifikasi Jalan Betung Mangunjaya, terima kasih sekali. Bapak. Kemudian. yang dari Pak Ishak Mekki Danau Teloko ini baru selesai desainnya tahun ini, tahun depan sudah dialokasikan setelah Tahun 2023-2024 untuk bisa disesuaikan sebesar mungkin 150 miliar *gitu* Pak, untuk 2 tahun, terima kasih Bapak. Yang lainnya Cisumdawu, ini juga kemarin baru kami bahas detail karena ini adalah investasi. Jadi, Cisumdawu kita rencanakan Desember ini selesai mungkin karena hujan semua kita harus memakai material yang lebih bisa mengadaptasi hujan, pasti ini ada dengan anggaran yang lebih mahal. *Ah* ini

BUJT-nya investornya agak, apa agak relaktan tapi kemarin sudah kita putuskan, mereka terima dan akan kita percepat soal penyelesaiannya. Paling lambat, kalau itu terlambat sampai Januari tapi itu pasti selesai. Saya kira itu Pak, saya kebetulan kemarin. Yang seksi 1, 2, 3 udah selesai dia minta dibangun, saya bilang *No*, sebelum 4, 5, 6 bisa yakin selesai saya *nggak* akan buka, apalagi mau diminta tarif, *nggak* bisa itu nanti saya khawatir ada brexit lagi nanti. Karena keluar dari KAA Malaka, Cimalaka itu ke jalan nasional yang mungkin menjadi ruwet. Jadi, kita selesaikan dulu 4, 5, 6 dan hampir selesai, mudah-mudahan akhir Desember atau Januari paling lambat disepakati untuk diselesaikan, itu Cisumdawu.

Kalau Pak Andi saya kira Sitingau Lauik, Bapak sudah mengikuti terus.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Izin Pak, pasar lelangnya kapan ya, Pak?

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Apanya?

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Sar fase 7 itu kira-kira kapan lelangnya, Pak?

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Ya, yang jelas kan itu program 2023 ya kan jadi.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Mohon maaf lewat Pimpinan, Mas.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Iya saya izin, *sorry*.

KETUA RAPAT:

Beri pengertian dia, berikutnya lewat sini, Pak. Silakan, Pak.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Oke, pasti nanti 2023 dilaksanakan, Pak Andre. Oke, saya kira itu yang Bapak yang kami bisa secara umum. Kalau Demak-Tuban tadi Pak Pak Dewo memang sudah selesai sekarang ini FS-nya sekarang sedang dalam penyusunan AMDAL. Kemudian, kalau sudah Penlok pasti akan langsung segera ditenderkan pada Tahun 2023 ini, Pak, kami sedang menyusun AMDAL. Kemudian untuk Penlok dan *insya Allah* Tahun 2023 Kuartal II atau III

nanti dilelang, Pak. Oke Pak Dewo ini sudah *tau* cuman pura-pura nanya *aja* mungkin, itu menandakan kemesraan-kemesraan Pak Dewo, Pak. *Oh gitu*.

Mungkin kalau BSPS, tidak ada larangan yang menerima Bansos tidak menerima BPS, Pak, *ndak* ada *policy* itu. Bahkan dulu waktu Pak Dewo juga usulkan kebetulan, kan harus ada kontribusinya *ah* sekarang itu *nggak* ada lagi, orang miskin *kok* disuruh kontribusi itu *gimana*. Saya kira sejak tahun kedua, tahun kedua dulu sudah *nggak* ada lagi tuh kontribusinya. Dulu kan ada aturan kalau dapat BPS maka yang mendapat itu harus ada kontribusi material, *ah* saya pikir *nggak logic*. Orang miskin mau dibantu ini berarti bantu *nggak* ikhlas. Jadi, kalau orang miskin kita bantu orang miskin ya kita bantu *aja* *nggak* ada lagi kontribusi itu, menurut saya *nggak* ada. Dan, sekarang juga yang Bansos-bansos itu *nggak* ada Pak *policy* dari kami dari Pimpinan PU, Dirjen teman-teman Dirjen *nggak* ada itu Pak, untuk penerima Bansos tidak boleh BPS. Menurut saya distortif itu.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Interupsi, Ketua, Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ndak apa-apa Menteri di *stop* ini.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Oh saya kira Bu Novi, *oh* bukan ya.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Bukan, Bu Novi. Iya ini BPS, Pak Menteri. Jadi, saya kira cuman susah saya mau berikan informasi ke Pak Basuki ini, Pak Basuki *nggak* punya WA, tolong stafnya kasih WA *dong* ke saya, supaya bisa lihat bagaimana hasil rekayasa yang saya buat BPS di pegunungan, khusus di Wamena dan sekarang lagi jalan di Yahukimo.

Pak Menteri, itu kalau lihat hasilnya itu kayak kita bangun rumah baru dengan papan semua, karena saya mengajak Pemerintah Daerah untuk bersama-sama. Jadi, Pemerintah Daerah berikan bantuan *chainsaw* untuk pengadaan material papan, itu tiap desa yang kita kasih. Maka masyarakat partisipasi masyarakat sangat tinggi untuk mereka siapkan itu dan itu jadi rumah yang bukan cuma layak tapi lebih besar Pak Menteri. *Nah*, ini mungkin saya akan mau berikan, iya itu 40 di sana, tetapi jadinya yang harusnya cuma renovasi itu jadinya dengan yang lama, itu seperti kami bangun baru. Hasilnya mungkin nanti bisa saya kirim ke Pak Menteri dan sekarang masyarakat, Kepala Desa dan ini sudah minta bagaimana untuk mereka bisa diberikan

untuk guru, karena terus terang guru tidak punya rumah di sana. Banyak guru yang mengajar pulang karena tidak punya tempat tinggal. Jadi, mungkin bisa mereka minta kita dapat dua rumah jadi satu kita bikin rumah guru ini *gimana*. Mungkin ini yang perlu nanti saya ngomong sama Pak Menteri, kita coba dengan dana yang minim mereka sepakat untuk berikan BSPS-nya dua untuk bangun satu rumah guru, yang betul-betul layak untuk bisa guru bisa hadir di sana karena mereka sangat membutuhkan guru untuk mengajar murid-murid. Saya kira itu, Pak Menteri.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Terima kasih, Bapak. Hanya dua hal lagi satu tentang Bendungan Kuwil di di Manado, saya kira sudah *nggak* ada masalah lagi tanah untuk Bendungan Kuwil. Karena memang tanah di Bendungan Kuil itu adalah kerabatnya Pak Gubernur, jadi sudah diselesaikan oleh Pak Gubernur sendiri. Tanggal 25 November kemarin sudah digenangi sudah *impounding* dan sudah siap untuk diresmikan.

Kemudian, untuk Pak Bob Andika saya kira terima kasih juga masukannya untuk Humbahas. Tujuh excavator sekarang sedang kami evaluasi, kalau emang itu disalahgunakan saya akan cabut, saya akan tarik itu Pak, oke. Makasih Bapak, saya kira itu Bapak, kalau nanti ada yang belum kelewatan nanti Pak Sekjen bisa menyiapkan jawaban tertulisnya.

Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Pak Ketua interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Bakri, cepat dikit ya.

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Iya sedikit saja, Pak Menteri.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Interupsi...intrupsi sudah jam 5, sepak bola sudah mulai.

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Amin...amin...amin...amin...amin.

KETUA RAPAT:

Sedikit...sedikit ayo, cepat cepat.

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Iya Pak Menteri, tadi saya *pingin* sedikit dengar aja Pak Menteri terkait di Jambi ini kan, saya kemarin seharian Pak, itu keliling dengan Kepala Balai, dengan kawan satker itu ada dua Kabupaten itu, Pak. Kabupaten Sarolangon dengan Kabupaten Merangin, itu *tuh* hampir mau 50 kilo itu jalan *tuh* memang parah rusak sekali.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Iya Pak, mohon maaf, Pak, tadi belum saya jawab. Kalau boleh sekalian saya *taulah* maksudnya. Jadi, pada saat kunjungan Presiden saya mendampingi Beliau dan Pak Gubernur memang menyampaikan ada ini, apa lalu lintas batubara. Pak Korlantas, ini kan dulu Kapolda Jambi, oke, beliau mestinya bisa *ngatur* itu. Saya malah bilang Pak Gubernur Jambi kalau bisa mengalihkan angkutan batubara ini, lewat sungai mungkin kita akan perbaiki jalannya, tapi kalau sekarang kita perbaiki hancur lagi, Pak. Padahal yang manajemen *traffic*-nya mestinya jadi perhubungan dan Korlantas, Bapak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak, makasih, Bapak.

F-PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Makasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Bakri. Demikianlah penjelasan dan tanggapan dari Pak Menteri, sekarang sampailah kepada kesimpulan. Silakan kesimpulan, coba tolong tayangkan kesimpulan iya.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin, 28 November 2022.

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas capaian realisasi program dan anggaran Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan November 2022 sebagai berikut:
Realisasi keuangan pertanggal 26 November 2022, 69,41%, sementara fisik adalah 75,04%. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat peningkatan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR RI, meminta Kementerian PUPR agar meningkatkan sistem *monitoring* dan evaluasi, serta melaksanakan koordinasi secara

reguler untuk memaksimalkan pelaksanaan program dan anggaran Tahun Anggaran 2022 di masing-masing Unit Kerja Esselon 1.

3. Komisi V DPR RI, meminta Kementerian PUPR antara lain untuk:
 - a. Mempercepat realisasi program infrastruktur berbasis masyarakat Tahun Anggaran 2022.
 - b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam mengoptimalkan pembangunan IKN dan *food estate*.
 - c. Meningkatkan sosialisasi konstruksi tahan gempa kepada masyarakat di daerah rawan gempa dan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Bagaimana, Anggota Komisi V yang terhormat, setuju? Pak Menteri Setuju? Baik

(RAPAT: SETUJU)

Ketuk katanya. Ya, dengan demikian maka kita ingin mendengarkan sambutan akhir dari Pak, penutup dari Pak Menteri PUPR.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Bapak Pimpinan, Ibu-Bapak Anggota DPR, Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati. Terima kasih atas masukannya ada berapa masukan yang pasti akan kami tindak lanjuti dari Pak Andre, Pak Andika, Pak Eddy, Bu Cen, Ibu saya, Bu Novi, Pak Boyman, Pak Boyman tadi sudah di jalan untuk pasti yang. Saya senang ini Pak Dewo *nggak nanyain* tentang Embung Pabelan mungkin sudah *nggak* prioritas lagi, sudah *nggak* prioritas lagi mungkin, Pak.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih ,Pak Menteri, mohon izin Pimpinan, izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, Pak Dewo.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Saya sudah mendapat pencerahan dari Pak Menteri kali ini, di Bendungan Cabean berarti berjalan tetap, Pak Menteri.

Terima kasih.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Oke, terima kasih, Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

F-PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Izin, Pimpinan, izin Pimpinan, boleh menyerahkan ini sebentar ke Pak Menteri, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan yang mau menyerahkan, silakan. Tukang foto tolong siap-siap lebih cepat, iya silakan, Pak Harvey.

MENTERI PUPR RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc):

Ini saya mohon maaf, ini saya belum pernah undang Pak Andre untuk main di PU, jadi nanti kapan-kapan saya *ajak* main.

KETUA RAPAT:

Penyerahannya cepat *dikit* iya foto-foto, iya cepat, Pak, soalnya belum ditutup.

Baiklah, dengan selesainya acara pada hari ini maka dengan ucapan *bismillahirrahmanirrahim*, kami tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB)

JAKARTA, 28 November 2022

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002